



**LAPORAN RISET PERHITUNGAN SROI & IKM
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TJSL)
PENGEMBANGAN DAERAH WISATA PANTAI AMBALAT TAHAP III
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022**

DISUSUN OLEH:

TIM RISET *SOCIAL MAPPING & PERHITUNGAN SROI*
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penyelesaian Laporan Riset *Social Return on Investment* (SRoI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UIW Kaltimra) pada Program Pengembangan Daerah Wisata Ambalat Tahap III. Riset ini merupakan kerjasama kolaboratif antara PT PLN (Persero) UIW Kaltimra dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman. Hasil riset diharapkan dapat memberikan wawasan berbasis data ilmiah untuk menciptakan program-program TJSL yang efisien dan efektif serta memberikan manfaat kepada *stakeholder* dan lingkungan secara berkelanjutan.

Laporan ini disajikan secara sistematis dimulai dengan menjelaskan rencana kerja yang meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, lingkup kegiatan dan metode penelitian. Pada bab selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan dipaparkan berdasarkan lima instrumen penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu analisis aktor, analisis dinamika kelompok, analisis finansial, analisis *community relations* dan perhitungan SRoI. Tim Peneliti kemudian menyusun kesimpulan dan kerangka rekomendasi bagi pelaksanaan dan pengembangan Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra berdasarkan prioritas *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi fokus PT PLN (Persero).

Riset ini merupakan wujud kolaborasi antar institusi yang diharapkan dapat menghasilkan *output* maupun *outcome* bermanfaat bagi kedua institusi, serta tentunya bagi masyarakat Kalimantan Timur. Tim Peneliti berharap penelitian serupa dapat dilaksanakan pula di lokasi lain sesuai kebutuhan bisnis perusahaan agar kegiatan-kegiatan TJSL dapat bermanfaat secara maksimal dan tepat sasaran bagi masyarakat yang lebih luas.

Terima kasih.

Waasalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Samarinda, November 2022

Hormat kami,

Tim Peneliti

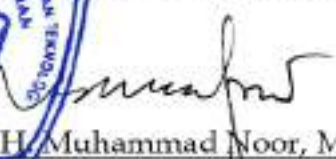
LEMBAR PENGESAHAN

- Judul Penelitian : Riset Perhitungan SRoI & IKM Program TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UIW Kaltimra)
- Pelaksana : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman
- Dasar Pelaksanaan : 1. Surat PT PLN (Persero) UIW Kaltimra Nomor 1907/CSR.00.01/C14000000/2022 Hal Permohonan Penawaran Kerja Sama Pelaksanaan Program Tata Kelola (TJSL) tanggal 18 September 2022;
2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 13993/UN.17.2/HK/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Persetujuan Kerja Sama;
3. Perjanjian Kerja Sama Nomor (Pihak Pertama) 0171.Pj/CSR.00.01/D14000000/2022; Nomor (Pihak Kedua) 14794/UN.17.2/HK/2022, tentang Pelaksanaan Riset Perhitungan *Social Return on Investment* (SROI) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tanggal 15 September 2022.

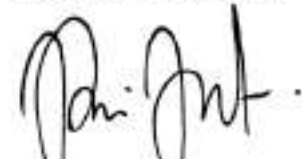
Samarinda, 30 November 2022



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman


H. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

Ketua Tim Peneliti


Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR.
NIP. 19810417 200501 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Nama dan Tujuan Kegiatan.....	3
1.3. Lokasi Penelitian.....	4
1.4. Kualifikasi Tenaga Ahli.....	4
1.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL)	7
2.2. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Program TJSL.....	11
2.3. <i>Social Return on Investment</i>	13
BAB 3 METODE PENELITIAN	15
3.1. Jenis Penelitian	16
3.2. Obyek dan Sumber Data Penelitian.....	16
3.3. Teknik Pengumpulan Data	17
3.4. Instrumen Penelitian.....	17
3.5. Analisis Data	28
3.6. Keabsahan Data.....	30
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Gambaran Umum	33
4.2. Hasil dan Pembahasan	36
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	88
5.1. Analisis Aktor	89
5.2. Analisis Dinamika Kelompok.....	90
5.3. Analisis Finansial.....	91
5.4. Analisis <i>Community Relations</i>	92
5.5. Analisis SROI & IKM.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kualifikasi Tenaga Ahli.....	4
Tabel 2 Jadwal Kegiatan	5
Tabel 3 Indikator Identifikasi Stakeholder.....	19
Tabel 4 Klasifikasi Stakeholder	19
Tabel 5 Kebutuhan Data Potensi Sosial Ekonomi	20
Tabel 6 Indikator Operasional SROl.....	24
Tabel 7 Rentang Nilai Indikator berdasar Aktor.....	37
Tabel 8 Sebaran Nilai berdasar Aktor di Kelurahan Amborawang Laut.....	39
Tabel 9 Rentang Nilai Indikator Dinamika Kelompok	43
Tabel 10 Sebaran Indikator Dinamika Kelompok di Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	45
Tabel 11 Analisis Finansial Usaha Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Amborawang Laut selama 5 tahun	51
Tabel 12 Atribut dan Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).....	66
Tabel 13 Nilai IKM pada Sembilan Atribut Terhadap Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	69
Tabel 14 Nilai IKM pada 26 indikator terhadap Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	71
Tabel 15 Identifikasi Stakeholder Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat	76
Tabel 16 Penilaian Input Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat.....	78
Tabel 17 Klarifikasi Output Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat.....	79
Tabel 18 Penetapan Outcome / Dampak Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat	80
Tabel 19 Penetapan Financial Proxy pada Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat	81
Tabel 20 Penetapan nilai dampak Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat	85
Tabel 21 Perhitungan Rasio SROl Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan dalam Pembuatan Stakeholder Mapping.....	18
Gambar 2 Salah satu fasilitas di Pantai Ambalat bagian dari Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra.....	34
Gambar 3 Peta Stakeholder Desa Wisata Pantai Ambalat berdasarkan Indikator Dampak dan Pengaruh terhadap Program TJSL	42
Gambar 4 Sebaran Indikator Dinamika Kelompok di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara	45
Gambar 5 Nilai tingkat kepentingan dan kinerja pada sembilan atribut IKM pada Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	70
Gambar 6 Importance Performance Analysis (IPA) pada Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	73
Gambar 7 Teori Perubahan dalam Pemetaan Dampak Program TJSL PT PLN (Persero).....	77

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejak awal tahun 2000-an, CSR tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan sukarela melainkan sebuah respon yang terintegrasi atas dampak bisnis (Allen & Craig, 2016). Pandangan tersebut kemudian mengembangkan ikatan kritis antara strategi bisnis dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun sampai dengan awal dekade kedua milenium, Husser et al. (2012) melihat implementasi konsep keberlanjutan masih sangat dini dan perusahaan lebih berfokus pada isu CSR semata. Namun, menurut Aslaksen et al. (2021) saat ini pembahasan tentang konsep keberlanjutan menjadi lebih populer untuk mendeskripsikan hubungan antara bisnis dan masyarakat. Oleh karenanya, penyusunan program CSR dan implementasinya oleh perusahaan saat ini banyak mengaplikasikan konsep keberlanjutan yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Di Indonesia, konsep CSR ditransformasikan menjadi istilah lain yaitu Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Konsep tersebut secara praktis diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lebih lanjut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga merilis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021. Kedua aturan tersebut kemudian menjadi dasar implementasi program TJSL oleh perusahaan-perusahaan milik negara, salah satunya PT PLN (Persero). Pelaksanaan program CSR PT PLN (Persero) disesuaikan dengan lokasi-lokasi tempat unit bisnis berada. Di Kalimantan Timur, unit bisnis yang mengelola program CSR PT PLN (Persero) adalah Unit Induk Wilayah Kalimantan Bagian Timur dan Kalimantan Utara (UIW Kaltimra).

PT PLN (Persero) menyusun program TJSL yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun fokus SDGs yang dimaksud adalah poin: (5) mencapai kesetaraan gender, (7) mencapai energi bersih dan terjangkau, (8) mencapai pekerjaan layak dan

pertumbuhan ekonomi, (12) mencapai konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, (13) mencapai penanganan perubahan iklim, (14) menjaga ekosistem laut, (15) menjaga ekosistem darat. Pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi merupakan salah satu prinsip kegiatan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UIW Kaltimra.

Pada tahun 2022, PT PLN (Persero) UIW Kaltimra mengelola beberapa program TJSL yang bertujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya pada Program TJSL Pengembangan Desa Wisata di Ambalat Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program TJSL yang dilaksanakan PT PLN (Persero) UIW pada wilayah tersebut.

1.2. Nama dan Tujuan Kegiatan

Nama kegiatan ini adalah Penelitian *Social Mapping* dan *Social Return on Investment* (SROI) Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) UIW Kaltimra.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. mengetahui kinerja penyelenggaraan Program TJSL yang telah dilaksanakan secara periodik oleh PT PLN (Persero) UIW Kaltimra;
2. mengetahui kekurangan setiap unsur dan penyelenggaraan program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra;
3. sebagai dasar evaluasi penetapan kebijakan dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan PT PLN (Persero) UIW Kaltimra pada periode selanjutnya;
4. untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan pemakaian sumber daya di dalam perusahaan;

- mengetahui tingkat SROI secara menyeluruh atas pelaksanaan Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra.

1.3. Lokasi Penelitian

Kegiatan Riset *Social Return on Investment* (SRoI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra Tahun 2022 dilaksanakan adalah Pengembangan Daerah Wisata Pantai Ambalat Tahap III yang berlokasi di Pantai Ambalat, Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Kualifikasi Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang ditugaskan dalam riset ini memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1 Kualifikasi Tenaga Ahli

No	Nama	Bidang Keahlian
1.	Dr. Rina Juwita, S.IP., MHRIR. (Ketua Tim Peneliti)	<i>Human Resources</i> dan CSR
2.	Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.	Kajian Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah
3.	Dr. Sukapti, S.Sos., M.Hum.	Kajian Sosial Pembangunan
4.	Dr. Erwiantono, S.Pi., M.Si.	<i>Community development</i>
5.	Heru Susilo, S.Pi., M.Si., PhD.	<i>Enviromental and resource economics</i>
6.	Erwan Sulistianto, S.Pi., M.Si.	<i>Enviromental and resource economics</i>
7.	Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., M.M.	Manajemen Komunikasi
8.	Ainun Nimatu Rohmah, M.A.	<i>Strategic communication</i>

1.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Penelitian dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari dimulai pada bulan Oktober sampai dengan November 2022. Adapun rangkaian kegiatan penelitian secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x							
2	Pengambilan Data Lapangan		x	x	x				
3	Analisis Data					x	x		
4	Penulisan Draft Laporan Penelitian						x		
5	Seminar Hasil Studi						x		
6	Revisi Laporan							x	
7	Penyerahan Laporan Akhir								x

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL)

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) pada dasarnya berakar dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR menjelaskan tanggung jawab bisnis kepada lingkungan, *stakeholder* dan masyarakat luas (Blowfield, 2005). Definisi CSR dapat dilihat dari lima perspektif (Fordham & Robinson, 2018), antara lain perspektif ekonomi (*economic*), hukum (*legal*), etis (*ethical*), filantropis (*philanthropic*) dan interaksi (*interaction*). Perspektif ekonomi melihat CSR akan selaras dengan kegiatan utama bisnis, sementara dari sisi etis dan filantropis CSR dipandang sebagai kebutuhan untuk memberikan nilai keberlanjutan kepada komunitas dan sebuah upaya membangun komunitas. Terakhir, perspektif interaksi dikembangkan dari padangan Carroll bahwa CSR merupakan alat perubahan sosial. Menurut perspektif interaksi, CSR memiliki peran yang lebih besar untuk menciptakan pemberdayaan dan memberikan determinasi terhadap komunitas (Fordham & Robinson, 2018).

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mulai berkembang di tahun 1970-an hingga 1980-an. Konsep ini disusun berdasar pada konsep perkembangan (perkembangan sosial-ekonomi yang sejalan dengan kendala ekologis), konsep kebutuhan (redistribusi sumber daya untuk menjamin kualitas hidup bagi semua), konsep generasi mendatang (kemungkinan dari penggunaan jangka-panjang dari sumber daya untuk menjamin kualitas hidup generasi masa depan). Menurut Laporan Brundtland (1987) pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan lain-lain) yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Ordóñez & Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah: *pertama*, sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas

ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia; *kedua*, memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang; *ketiga*, kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas; *keempat*, integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupun pada masa mendatang tanpa batas; *kelima*, memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi; *keenam*, hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya; dan *ketujuh*, menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.

Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang secara rinci memiliki 169 target terukur untuk rencana aksi global yang diharapkan berhasil pada tahun 2030. SDGs merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan dengan prinsip universal, terintegrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal. Tujuan ini diimplementasikan melalui rencana aksi yang menysasar pada 5P, yaitu: *People* (umat manusia), *Planet* (lingkungan), *Prosperity* (kemakmuran), *Peace* (perdamaian), dan *Partnership* (kemitraan) yang saling terkait satu sama lain. Adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut merupakan wujud komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dapat dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak. Dalam pelaksanaan SDGs, terdapat empat prinsip yang perlu diperhatikan sebagai berikut (Zulkifli, 2013):

1. Pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumberdaya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat.
2. Menghargai keanekaragaman (*diversity*). Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keanekaragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumber daya alam, sedangkan keanekaragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang.
3. Menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dimana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri.
4. Perspektif jangka panjang. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik.

Setiap perusahaan kemudian dapat mengintegrasikan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan memilih poin-poin tujuan yang menjadi

fokus strategi jangka panjang perusahaan. Sebagian perusahaan juga menindaklanjuti upaya transparansi pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan membuat laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang mengacu pada panduan penulisan laporan keberlanjutan ISO 26000.

2.2. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Program TJSL

Bagi sebuah perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, terdapat dua aturan penting terkait implementasi TJSL pada unit bisnisnya yang perlu menjadi perhatian. Peraturan dasar yang menjelaskan tanggung jawab perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada peraturan tersebut dijelaskan definisi TJSL sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Ketentuan kewajiban pelaksanaan TJSL sesuai Undang-Undang ini diperuntukkan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam dan pelaksanaannya harus dianggarkan sekaligus diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Pada peraturan yang sama, tepatnya di Pasal 66 butir (c) disebutkan kewajiban Perseroan untuk menyusun laporan pelaksanaan TJSL setiap tahunnya.

Kewajiban pelaksanaan TJSL dalam Undang-Undang tersebut mendapat tantangan dari beberapa pihak. Hal ini diajukan dengan alasan tidak ada negara yang mewajibkan pelaksanaan TJSL dalam bentuk ketentuan Undang-Undang selain di Indonesia (Pohan, 2018). Untuk itulah kemudian kewajiban yang ditetapkan Pemerintah diperuntukkan bagi perusahaan dengan bisnis yang bersinggungan atau berdampak pada sumber daya alam. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya berupaya mengajak Perseroan untuk melaksanakan TJSL secara

sukarela. Meskipun pada aturan tersebut Pasal 74 disebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan TJSL akan dikenakan sanksi, namun tidak dijelaskan secara detail bentuk sanksi dan metode pembebanannya (Budiman et al., 2020). Hal ini secara tidak langsung menjelaskan kelonggaran dari aturan tersebut.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN juga merilis Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021. Pada peraturan tersebut, definisi TJSL mendapat sedikit perluasan dari definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan. Jika pada UUPU fokus pembangunan berkelanjutan pada bidang ekonomi, Peraturan Menteri BUMN tersebut menyebutkan pembangunan berkelanjutan memberi manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, hukum serta tata kelola perusahaan. Pada **aspek sosial** penekanan berada pada pilar pemenuhan hak dasar manusia secara adil, sementara ada **aspek lingkungan** berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Pada **aspek ekonomi**, keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bisnis yang terjangkau dan kemitraan menjadi pilar yang harus diperhatikan. Terakhir, pada **aspek hukum dan tata kelola**, pilar pelaksanaan TJSL mengacu pada terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pelaksanaan TJSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN dilaksanakan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, pada Pasal 6 dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Program TJSL BUMN harus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan terakhir monitoring dan evaluasi. Perseroan juga diwajibkan melakukan publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN dengan mengutamakan komunikasi dari aspek dampak Program TJSL BUMN dan penerima manfaat. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dibutuhkan kegiatan pengukuran dengan

metode penelitian ilmiah untuk menunjukkan dampak program secara akuntabel.

2.3. *Social Return on Investment*

Konsep *Social Return on Investment* (SRoI) dirintis di Amerika pada awal tahun 1990 dan dikembangkan di Inggris pada 2008. Nicholls et al. (2009) menjelaskan terdapat tujuh prinsip SRoI yang menjadi dasar dalam membangun kerangka kerja analisis yaitu: 1) melibatkan *stakeholder*, 2) memahami perubahan yang terjadi, 3) nilai-nilai yang penting, 4) memasukkan material yang jelas, 5) menghindari klaim yang berlebihan, 6) harus transparan, dan 7) melakukan verifikasi atas hasilnya. Lingane & Olsen (2004) menjelaskan bahwa SRoI berakar dari konsep *Return on Investment* (ROI) yang digunakan oleh investor finansial tradisional untuk menilai profit dalam relasi investasi modal yang dilakukan. Sementara, SRoI menggambarkan dampak sosial dari bisnis atau operasi dari organisasi non-profit yang relatif terhadap investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan dampak tersebut dan eksklusif terhadap pengembalian finansial kepada investor (Lingane & Olsen, 2004).

SRoI merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan ikatan nilai yang tercipta dalam aktivitas manusia (Nicholls, 2017). Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak yang dihasilkan oleh organisasi kepada masyarakat dan lingkungan (Gargani, 2017). Kegiatan analisis SRoI melibatkan enam langkah (Nicholls et al., 2009), yaitu: 1) menyusun ruang lingkup dan mengidentifikasi *stakeholder* kunci, 2) memetakan dampak, 3) membuktikan dampak-dampak dan memberikan nilai kepada dampak-dampak tersebut, 4) menetapkan dampak, 5) mengkalkulasi SRoI, serta 6) melaporkan, menggunakan dan menyematkan hasil. Menurut KPMG (2018), kegiatan ini bermanfaat bagi organisasi untuk memperkuat keberlanjutan bisnis khususnya terkait meningkatkan *brand image* perusahaan,

memperkuat kemampuan finansial, membuat program CSR menjadi lebih atraktif, mendefinisikan kembali strategi investasi CSR, memperkirakan dampak di masa depan dan mengevaluasi dampak pada program CSR saat ini atau sebelumnya, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas *stakeholder*.

Terdapat dua kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan evaluasi SROI, yaitu dengan: 1) membandingkan manfaat dan biaya secara sumatif, 2) mengevaluasi biaya dan manfaat sesuai dengan mempertimbangkan kontribusi orang-orang yang terlibat (Yates & Marra, 2017). Analisis SROI memperhitungkan seluruh hasil sosial, lingkungan dan keuangan yang berwujud maupun tidak berwujud sebagai hasil dari uang yang diinvestasikan. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan kuantifikasi keuangan (monetisasi) atau dikenal dengan konsep *Cost Benefit Analysis*. Melalui perhitungan ini, pelaksana program dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari intervensi sosial yang diberikan melalui program CSR. Dengan kata lain, perhitungan ini menunjukkan kelayakan secara finansial dari program TJSL yang dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perhitungan SROI merupakan sebuah langkah strategis yang dilakukan perusahaan (Rusdin, 2016). Artinya, kegiatan ini selain menjadi bagian penting dalam mengukur hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) program CSR, juga menjadi pertimbangan Manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mengelola bisnis dengan lebih efektif dan efisien (Santoso et al., 2018). Di sisi lain, program CSR pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh legitimasi sosial. Dengan pengungkapan hasil dan dampak yang terukur melalui perhitungan SROI, perusahaan memiliki akuntabilitas publik dan membangun reputasi positif pada *stakeholder* mereka. Kedua hal ini dapat menjadi keunggulan kompetitif dari perusahaan yang menjadi pembeda dari perusahaan lain.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif). Menurut Sugiyono (2016) penelitian campuran mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama dalam sebuah penelitian sehingga dapat diperoleh data yang komprehensif, valid, dapat dipercaya dan objektif. Pada penelitian ini, Tim Peneliti menggunakan strategi metode campuran konkuren (*concurrent mixed method*) dengan menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dipilih sehingga pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan survey dapat dilakukan secara bersamaan (Creswell, 2018).

3.2. Obyek dan Sumber Data Penelitian

Objek dan sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah masyarakat yang berada di lokus utama dalam wilayah sampel Perhitungan SROI dan IKM PT PLN (Persero) UIW Kaltimra pada laporan ini yaitu pada Pengembangan Daerah Wisata Pantai Ambalat Tahap III di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan literatur lain (Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini dan hasil data yang akan diolah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau pengamatan dengan usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.
- b. Sumber data sekunder yakni sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini berupa media buku (dokumen, katalog, arsip sekolah) dan media internet untuk mendukung analisis dan pembahasan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan dua metode pengumpulan data, yaitu

1. wawancara individu bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif. Koresponden terdiri dari masyarakat terdampak dan sumber kunci (*key informants*). Masyarakat terdampak dipilih melalui teknik *sampling multistage*, sementara sumber kunci adalah kepala desa atau kepala dusun dari area terdampak; serta
2. pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner.

3.4. Instrumen Penelitian

3.4.1 Pemetaan Stakeholders

Stakeholder Mapping merupakan gabungan proses, penelitian, dan pembahasan yang menggambarkan perspektif berganda untuk menentukan urutan kunci dari keseluruhan *stakeholder* yang ada. Untuk memetakan *stakeholder*, terdapat 4 (empat) tahapan yang perlu dilakukan (Gambar 1) berdasarkan Metode *Business for Social Responsibility*. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi (*identifying*) atau membuat daftar pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan, seperti organisasi atau individu.

Selanjutnya, daftar *stakeholder* tersebut dianalisis (*analysing*) lebih lanjut untuk memahami relevansinya, memahami hubungan timbal balik antara perusahaan dengan *stakeholder* dan memberikan prioritas berdasarkan kepentingan *stakeholder*. Tahap berikutnya, *stakeholder* dipetakan (*mapping*) sebagai perangkat visualisasi dan analisis yang berguna untuk menentukan *stakeholder* mana yang paling berpengaruh bagi perusahaan sesuai dengan besarnya kekuatan (*power*) dan pengaruh (*interest*) dari para *stakeholder*. Tahapan dalam menganalisis *stakeholder* yang dimaksud dimulai dari menganalisis *stakeholder* yang diklasifikasikan sebagai subyek (*subjects*), pemain kunci (*key player*), pengikut lain (*crowd*), dan pendukung (*contest setters*). Adapun penjelasan untuk masing-masing klasifikasi adalah sebagai berikut:

1. Subyek (*subjects*), jika *stakeholder* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi berpengaruh rendah terhadap perusahaan.
2. Pemain kunci (*key player*), jika *stakeholder* memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi bagi perusahaan.
3. Pengikut lain (*crowd*), jika *stakeholder* memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap perusahaan.
4. Pendukung (*contest setters*), jika *stakeholder* memiliki tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi bagi perusahaan.



Gambar 1 Tahapan dalam Pembuatan *Stakeholder Mapping*
 Sumber: Business for Social Responsibility (2011)

Proses identifikasi (*identifying*) atau membuat daftar pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perusahaan, seperti organisasi atau individu dilakukan dengan menggunakan panduan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3 Indikator Identifikasi *Stakeholder*

NO	STAKEHOLDER (Individu/ Organisation)	ISU/KEPENTINGAN	SKOR KEKUATAN 1-4	SKOR PENGARUH 1-4	ALAMAT/ TELPON
----	---	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

Tahapan pengumpulan data *stakeholder* akan dilakukan melalui wawancara dengan: 1) petugas PT PLN (Persero) yang ada di lokus penelitian, dan 2) Camat dan pegawai kecamatan di lokus penelitian. Selanjutnya, daftar *stakeholder* tersebut dianalisis (*analysing*) lebih lanjut untuk memahami relevansinya, memahami hubungan timbal balik antara perusahaan dengan *stakeholder*, dan memberikan prioritas berdasarkan kepentingan *stakeholder*. Analisis ini dilakukan berdasarkan nilai yang diberikan oleh informan untuk kekuatan dan pengaruh *stakeholder* tersebut berada pada rentang 1 hingga 4. Nilai 4 menunjukkan tingkat kekuatan dan pengaruh paling tinggi, sedangkan nilai 1 merupakan tingkat paling kecil terhadap perusahaan. Selanjutnya nilai *power* (kekuatan) akan dikalikan dengan dampak atau pengaruh dari masing-masing *stakeholder*. Hasil perkalian antara kedua nilai berada pada rentang 1 hingga 16. Angka tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk mengklasifikasikan *stakeholder*.

Tabel 4 Klasifikasi Stakeholder

Nilai Kekuatan x Pengaruh	Klasifikasi Stakeholder
16 – 13	Sangat Penting
12 – 7	Penting
6 – 4	Cukup Penting
< 4	Kurang Penting

Sumber: Business for Social Responsibility (2011)

Jika peta persepsi aktor dibagi ke dalam empat kuadran, maka Kuadran I menunjukkan para aktor dengan persepsi pengaruh dan dampak terkuat, Kuadran II dengan pengaruh rendah namun berdampak tinggi, Kuadran III aktor dengan pengaruh besar namun berdampak kecil dan Kuadran IV aktor yang memiliki persepsi pengaruh maupun dampak rendah terhadap keputusan program masyarakat.

3.4.2 Pemetaan Potensi Sosial Ekonomi

Adapun data potensi sosial ekonomi kecamatan di wilayah lokus penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Kebutuhan Data Potensi Sosial Ekonomi

No	Data	Aspek Data	Sumber Data
1	Data Umum	a. Luas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		b. Batas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		c. Akses jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		d. Lahan yang digunakan & tidak dipergunakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		e. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		f. Jumlah Penduduk (Jenis Kelamin, Jumlah KK, Struktur Umur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		g. Pekerjaan (jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		h. Tingkat Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Umum dan Khusus)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		i. Jumlah Penduduk Miskin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer

No	Data	Aspek Data	Sumber Data
		j. Jumlah Penduduk Rentan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		k. Sarana Prasarana (Pemerintah, Kesehatan, Pendidikan, Ibadah dan prasarana umum termasuk keuangan, akomodasi, dll)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
2	Data Personel	a. Nama Camat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		b. Nama Sekretaris Camat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		c. Jumlah Perangkat Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		d. Jumlah BPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		e. Jumlah Perangkat Kesehatan (Tenaga Medis)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		f. Jumlah Perangkat Pendidikan (Guru)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
3	Data Potensi Sumber Ekonomi Produkti	a. Sektor Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Ketua Kelompok ▪ BPS Kutai Timur & Berau ▪ Data Primer
		b. Sektor Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Ketua Kelompok ▪ BPS Kutai Timur & Berau ▪ Data Primer
		c. Sektor Peternakan dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Ketua Kelompok ▪ BPS Kutai Timur & Berau ▪ Data Primer
		d. Sektor Lainnya (Lingkungan, wisata, jasa)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Ketua Kelompok

No	Data	Aspek Data	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPS Kutai Timur & Berau ▪ Data Primer ▪
4	Data Keuangan	a. Pendapatan Asli Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ OPD Terkait ▪ Bappeda Kutai Timur & Berau ▪ Data Primer
		b. Besaran Anggaran Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ OPD Terkait ▪ Bappeda Kutai Timur & Berau ▪ Data Primer
		c. Bantuan yang diterima Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ OPD Terkait ▪ Bappeda Kutai Timur & Berau ▪ Data Primer
		d. Hibah/Bantuan dari Pihak Luar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ OPD Terkait ▪ Bappeda Kutai Timur & Berau ▪ Data Primer
5	Data Kelembagaan	a. Jumlah Kelurahan/Desa (Nama)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		b. Bumdes (Jumlah, jenis usaha binaan Bumdes, jumlah modal dasar, jumlah keuangan yang dikelola)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		c. Kelompok Nelayan/Tani (jumlah, jenis usaha, jumlah modal dasar, jumlah keuangan yang dikelola)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
		d. Kelompok usaha masyarakat (jumlah, jenis usaha, jumlah modal dasar, jumlah keuangan yang dikelola)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer

No	Data	Aspek Data	Sumber Data
		e. LSM/Ormas (Nama dan Ketua, jika memungkinkan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Data Primer
6	Data Kewenangan	a. Jumlah anggota Linmas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Polsek ▪ Data Primer
		b. Jumlah Kejadian Kriminal (pencurian, pelecehan seksual, kenakalan remaja, pembunuhan, perampokan, penipuan, narkoba)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Polsek ▪ Data Primer
		c. Jumlah Kejadian Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Polsek ▪ Data Primer
		d. Jumlah pos bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Polsek ▪ Data Primer
		e. Jumlah kebakaran liar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monografi Kecamatan ▪ Polsek ▪ Data Primer

3.4.3 Perhitungan *Social Return of Investment* (SRoI)

Data yang digunakan untuk menganalisis SRoI didapatkan dari

1. dokumen laporan dari PT PLN (Persero) UIW Kaltimra;
2. data/laporan yang terdapat pada komunitas/kelompok sasaran; serta
3. hasil wawancara dan diskusi dengan *stakeholder* kunci seperti anggota kelompok penerima manfaat, pendamping program, dan pihak Sub Bidang TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra.

Data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasi. Untuk data yang memiliki nilai kuantifikasi rupiah tetap dan jelas, langsung diinput

sebagai nilai finansial, tetapi untuk beberapa komponen yang masih dalam perkiraan baik karena kurangnya pencatatan maupun karena obyek yang dihitung tidak secara pasti dapat dinilai (seperti nilai manfaat dari bertambahnya pengetahuan, perubahan *mindset*, dan *benefit* yang berbentuk jasa), maka dilakukan perhitungan sesuai dengan konteks program yang ada.

Proyeksi nilai diupayakan sedekat mungkin dan wajar, dengan memberikan asumsi-asumsi dan pemisalahan terhadap hal-hal yang sejenis atau menggunakan ukuran serta standar harga yang berlaku di masyarakat sesuai dengan konteks program. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk mendapatkan perhitungan nilai dampak sampai memperoleh nilai *present value*, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan nilai rasio SROI.

Data yang diperoleh kemudian diolah sampai dengan perhitungan SROI sebagai berikut:

$$NPV = [Present\ value\ of\ benefits] - [Value\ of\ investments]$$

$$SROI\ Ratio = \frac{Present\ Value}{Value\ of\ Input}$$

Pada perhitungan ini, nilai suku bunga merujuk pada angka suku bunga dasar kredit (*prime lending rate*) dari Bankaltimtara yang berlaku di wilayah studi yaitu 8 persen.

Tabel 6 Indikator Operasional SROI

KODE	KONSTRUK	DIMENSI	INDIKATOR	ALAT UKUR
X	Input	Finansial (X1) Non Finansial (X2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Partisipasi ▪ Biaya Transportasi ▪ Modal Dana ▪ Nilai Sumbangsih Barang 	Kuantitas Uang
Y	Standar Operasional Aktivitas	Pembentukan Tim (Y1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orientasi Anggota ▪ Orientasi Kompetensi dan Fungsional 	Skala Gutman

KODE	KONSTRUK	DIMENSI	INDIKATOR	ALAT UKUR
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan Aturan dan Nilai Bersama tim 	
		Perencanaan Tim (Y2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan Deskripsi dan Deadline Kerja ▪ Penetapan Strategi dan Tujuan Tim ▪ Penetapan Anggaran Dana ▪ Penetapan Rencana Pengembangan Tim 	
		Perencanaan Pribadi (Y3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian Kapasitas Individu ▪ Penetapan Tujuan Pengembangan Diri 	
		Peningkatan Capaian (Y4)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Aktivitas Proyek ▪ Pemberian Intensif 	
		Tracking Kinerja (Y5)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Pribadi ▪ Pengulasan Kinerja Tim secara Periodik 	
		Pertemanan yang Saling Mendukung (Y6)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rutin ▪ Kegiatan Apresiasi, Insentif dan Keakraban ▪ Pemberian Saran Pengembangan Diri 	
		Pembubaran Tim (Y7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Laporan Ketercapaian Target ▪ Transisi dengan Tim Pelaksana Penerus ▪ Exit Interview 	
Z	Output	Jangkauan Fisik (Z1) Jangkauan Virtual (Z2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Benefit ▪ Engagement ▪ Reach ▪ Jumlah Click Call-to-action 	Kuantitas Orang

KODE	KONSTRUK	DIMENSI	INDIKATOR	ALAT UKUR
		Frekuensi Aktitivitas (Z3)	▪ Jumlah Pelaksanaan	Kuantitas Aktivitas
		Penjualan (Z4)	▪ Jumlah Terjual	Kuantitas Barang
		Database (Z5)	▪ Nilai Penjualan ▪ Jumlah Informasi Pribadi	Kuantitas Orang
A	<i>Outcome</i> Pemenuhan Potensi Manusia	Kepercayaan Diri (A1)	▪ Penghargaan Diri ▪ Kesadaran Diri ▪ Kemauan Belajar dan Menelusuri Minat	Skala Thurstone
		Kepemimpinan (A2)	▪ Keterampilan Public Speaking ▪ Keterampilan Active Listening ▪ Keterampilan Komunikasi Nonverbal ▪ Kolaborasi dan Kerjasama Tim ▪ Keterampilan Membangun Relasi ▪ Keterampilan Memberdayakan Orang lain	
		Kerelawanan (A3)	▪ Keterlibatan Membangun Masyarakat ▪ Frekuensi Donasi	
		Kemampuan Bahasa Inggris (A4)	▪ Frekuensi dan Kelancaran Berbahasa Inggris	
		Kompetensi Lintas Budaya (A5)	▪ Toleransi ▪ Apresiasi Budaya Sendiri ▪ Apresiasi Budaya Asing ▪ Wawasan Global	
		Kemampuan Pemecahan Masalah (A6)	▪ Ketekunan dan Kreativitas ▪ Berpikir Strategis dan Menyeluruh ▪ Manajemen Proyek ▪ Frekuensi Waktu diluangkan Bersama	

KODE	KONSTRUK	DIMENSI	INDIKATOR	ALAT UKUR
		Kerukunan Dalam Keluarga (A7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frekuensi Waktu Diluangkan Bersama 	
B	<i>Outcome</i> Kewirausahaan	Keterampilan Bisnis (B1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Bisnis ▪ Keterampilan Pembukuan ▪ Keterampilan Pemasaran ▪ Keterampilan Penjualan ▪ Keterampilan IT ▪ Keterampilan Negosiasi ▪ Keterampilan Pengemasan 	Skala Thurstone
		Tindak Lanjut Bisnis (B2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Bisnis Baru Didirikan ▪ Jumlah Kompetisi Bisnis Dimenangkan 	Kuantitas Bisnis Kuantitas Kompetisi
		Pemberdayaan UMKM (B3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Akses Pemodalan Finansial ▪ Akses Legalitas Izin Usaha ▪ Produktivitas Harian ▪ Jumlah Kreasi Produk Baru ▪ Jumlah Inovasi Produk 	Kuantitas Uang Skala Guttman Kuantitas Produk
		Perbaikan Kondisi Kerja (B4)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Jalur Pemasaran Baru ▪ Tingkat Tekanan Kerja 	Kuantitas Jalur Skala Thurstone
C	<i>Proxy</i> Indikator	Benefit Transfer (C1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Transfer Unit ▪ Nilai Transfer Fungsi Parametrik 	Kuantitas Uang
		Revealed Preference (C2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Travel Cost ▪ Nilai Hedonic Pricing 	
		Stated Preference (C3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Willingness to Pay ▪ Nilai Willingness to Accept 	
D	Monetasi Nilai Perubahan;	Penyesuaian Konstekstual (D1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Disparitas Daya Beli 	Skala Rasio

KODE	KONSTRUK	DIMENSI	INDIKATOR	ALAT UKUR
	Variabel Kontrol C		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Tukar Mata Uang ▪ Nilai Penyesuaian Inflasi 	
E	Tingkat Andil; Variabel Kontrol A dan B	Durasi Perubahan (E1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Waktu (Tahun) ▪ Tingkat Suku Bunga Diskonto ▪ Drop Off 	
		Klaim Kontribusi Perubahan E2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deadweight ▪ Attribution ▪ Displacement 	

3.5. Analisis Data

Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengukuran Keberlanjutan

Penelitian ini akan menghasilkan *outcome* berupa hasil perhitungan SRoI dan IKM sesuai dengan lokus yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) UIW Kaltimra, serta rekomendasi kegiatan CSR/TJSL di wilayah terkait sebagai bahan perhitungan dan pertimbangan SRoI.

2. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016) dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya mengakibatkan variasi data yang tinggi. Data yang diperoleh umumnya data kualitatif. Berikut alur atau proses analisis menurut Miles & Huberman (2012) yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari tahap analisis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Peneliti memutuskan mana data yang besar yang harus dikodekan dan mana yang harus dikeluarkan, mana data yang dapat disampaikan yang semuanya merupakan pilihan-pilihan analitik.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting kedua aktivitas analisis adalah penyajian data. Secara umum, sebuah penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Pola kehidupan sehari-hari, melihat penyajian-penyajian membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termaksud analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman itu.

c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Alur ketiga dari aktivitas analisis adalah pengambilan kesimpulan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kasual, dan proposisi. Peneliti yang kompeten berpegang pada kejelasan kesimpulan, membangun keterbukaan dan skeptis, tetapi kesimpulan tetap ada, tidak jelas pada mulanya, kemudian bertambah secara eksplisit dan mendasar. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga

pengumpulan data terakhir tergantung pada ukuran catatan: pengkodeanya, penyimpanan, dan metode pencarian yang digunakan; daya tarik peneliti; dan batas-batas lain yang dapat ditemukan.

Pengambilan kesimpulan juga dapat diverifikasi sebagai tahap analisis. Verifikasi dapat menjadi penentuan sebagaimana lintasan kedua pikiran peneliti melalui tertulis, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan atau dapat pula tidak dicari dan digabungkan dengan argumentasi pendek dari *review* dari kolega untuk membangun *consensus inter subyektif* atau dengan hasil yang baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data.

3.6. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, kredibilitas, transferabilitas, dependibilitas, dan konfirmabilitas (Sugiyono, 2016). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2016). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa berbagai prespektif. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2016).

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2016).

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2016).

BAB 4
HASIL & PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Daerah wisata Pantai Ambalat terletak di Pantai Ambalat, Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Samboja merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2021), kecamatan ini terletak di $116^{\circ} 50' \text{ BT} - 117^{\circ} 14' \text{ BT}$ $0^{\circ} 52' \text{ LS} - 1^{\circ} 08' \text{ LS}$, yang berbatasan di bagian Selatan dengan Selat Makasar, di bagian Utara dengan Loa Janan, di bagian Timur dengan Muara Jawa dan di bagian Barat dengan Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Luas wilayah kecamatan ini adalah 1.161,13 km².

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2021), Kelurahan Amborawang Laut merupakan salah satu dari 23 Kelurahan yang terletak di Kecamatan Samboja. Kelurahan ini memiliki 23 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 19,47 km². Luas tersebut tidak sebesar kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Samboja seperti Kelurahan Sei Merdeka (102,44 km²), Kelurahan Bukit Merdeka (95,82 Km²) dan Kelurahan Karya Merdeka (95,82 km²). Selain itu, Kelurahan Amborawang Laut memiliki 1.981 penduduk yang terdiri dari 1.117 laki-laki dan 864 perempuan.

Pantai Ambalat terletak di Kelurahan Amborawang laut, tepatnya di Dusun Selok Batu RT IV. Nama Ambalat diambil dari singkatan Amborawang Laut yang merupakan area tepi pantai dengan jajaran pohon pinus sepanjang 7 km. Lokasinya terletak di Jalan Porors Samboja-Teritip dan mulanya dikelola dengan sederhana oleh masyarakat sekitar dengan dikoordinir oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Amborawang Laut. Pantai Ambalat merupakan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga panoramanya memiliki keunikan khususnya di malam hari.



Gambar 2 Salah satu fasilitas di Pantai Ambalat bagian dari Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra

PT PLN (Persero) UIW Kaltimra menyalurkan bantuan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya Pengembangan Desa Wisata melalui Program TJSL di Pantai Ambalat sejak tahun 2020. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua Pokdarwis Karya Ambalat, Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra telah memberikan dampak positif khususnya dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Sebagai salah satu program prioritas TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra, bantuan yang telah diberikan untuk pengembangan Pantai Ambalat sebagai objek wisata antara lain berupa pembangunan fasilitas umum dan lapak jualan untuk pelaku UMKM.

Pada tahun 2022, Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra memberikan dukungan pembangunan fasilitas wisata *flying fox* dengan total bantuan Rp 225.000.000,-. Total bantuan tersebut terdiri atas pembangunan *flying fox* sejauh 60 meter, *skybike* panjang kurang lebih 40 meter, rehabilitasi Ambalat Center dan pengadaan barang UMKM Karya Ambalat, tiang menara, promosi dan lainnya. Bantuan ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Karya Ambalat dengan koordinator Bapak Udin HD.

Bantuan yang diberikan Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra pada tahun 2022 merupakan bantuan tahap ke-tiga. Selain fasilitas *flying fox*, Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra juga mengembangkan *spot* foto, penyewaan ATV dan sepeda listik serta wahana hiburan lainnya. Total dana yang telah disalurkan oleh Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra sejak tahun 2020 hingga 2022 telah mencapai Rp 785 juta (Wibisono, 2022). Menurut sumber yang sama, kunjungan per bulan pada semester pertama tahun 2022 telah mengalami peningkatan lebih dari 4 kali lipat yakni sebanyak 7.677 per bulan dari yang sebelumnya hanya rata-rata 1.863 kunjungan per bulan. Selain itu, pengembangan wisata Pantai Ambalat juga telah memberikan kontribusi pemasukan pendapatan pajak asli daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari retribusi kunjungan wisata mencapai Rp 186 juta.

Berdasarkan riset *social mapping* dan perhitungan SROI yang dilakukan pada tahun 2021, diketahui nilai rasio SROI untuk Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra adalah 3.21 yang menunjukkan bahwa setiap Rp 1 yang diinvestasikan oleh PT PLN (Persero) UIW Kaltimra pada pengembangan Pantai Ambalat akan menciptakan pengembalian sosial sebesar Rp 3,21 sebagai manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, PT PLN (Persero) UIW Kaltimra telah menciptakan dampak sosial yang memberikan manfaat bagi *stakeholder*, khususnya masyarakat Pantai Ambalat dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Pengantar

Guna menyusun perhitungan skor SROI dan IKM, dibutuhkan pemetaan kondisi sosial masyarakat di wilayah yang menjadi fokus penelitian. Pemetaan tersebut dilakukan dengan menggunakan empat instrumen yaitu analisis aktor, analisis dinamika kelompok, analisis finansial, dan analisis *community relations*. Melalui analisis pemetaan sosial yang dilakukan, diperoleh gambaran yang komprehensif terkait kondisi sosial masyarakat dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas program pemberdayaan. Melalui data yang dikumpulkan Tim Peneliti kemudian dilakukan perhitungan IKM dan SROI untuk tiga wilayah yang menjadi lokus penelitian. Skor yang diperoleh kemudian menggambarkan monetisasi dampak sosial yang diterima *stakeholder* dari Program TJSL dan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UIW Kaltimra dalam kurun waktu satu tahun laporan. Hasil analisis pemetaan sosial serta perhitungan IKM dan SROI tersebut disajikan pada bagian pembahasan selanjutnya.

4.2.2. Analisis Aktor

Analisis aktor dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai orang-orang (aktor) yang memiliki pengaruh terhadap program TJSL, besaran/tingkatan pengaruh para aktor terhadap program, dan besaran/tingkatan dampak dari program TJSL terhadap para aktor. Dalam hal ini, asumsi dari analisis aktor adalah setiap orang/aktor memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap suatu kegiatan/program. Demikian pula, dampak yang dirasakan atau ketergantungan setiap orang dari suatu program berbeda-beda. Indikator tingkat pengaruh memperlihatkan seberapa besar seseorang/aktor mampu mempengaruhi kegiatan atau program TJSL. Indikator tingkat dampak memperlihatkan seberapa besar

seseorang/aktor menerima akibat baik negatif maupun positif dari suatu program TJSL.

Kajian ini telah mengidentifikasi aktor-aktor yang diperkirakan memiliki pengaruh pada masyarakat di lokasi penelitian, yakni: Kepala kampung/kepala desa, Bumdes, ketua RT/RW, tengkulak/patron, dinas teknis, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat atau LSM, tokoh perempuan, pengguna sumber daya alam. Untuk menentukan peringkat kelas pada indikator pengaruh aktor dan indikator dampak program Pengembangan Daerah Wisata Pantai Ambalat Tahap III menggunakan rentang nilai yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 7 Rentang Nilai Indikator berdasar Aktor

No.	Aktor	Rentang Nilai		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Kepala kampung	11-25	26-39	40-55
2	BUMDES	11-25	26-39	40-55
3	Ketua RT	11-25	26-39	40-55
4	Patron	11-25	26-39	40-55
5	Dinas teknis	11-25	26-39	40-55
6	Tokoh agama	11-25	26-39	40-55
7	Tokoh adat	11-25	26-39	40-55
8	Tokoh LSM	11-25	26-39	40-55
9	Tokoh perempuan	11-25	26-39	40-55
10	Kelompok pengguna SDA	11-25	26-39	40-55

Keterangan: rentang nilai ini sebagai dasar menentukan peringkat kelas para aktor, baik pada indikator pengaruh aktor dan indikator dampak program

Atribut yang digunakan untuk melihat pengaruh aktor terhadap program dan dampak program terhadap aktor meliputi

- a. perencanaan dan penentuan keputusan jenis program;

- b. perencanaan dan penentuan keputusan pembiayaan program;
- c. perencanaan dan penentuan keputusan alokasi sumber daya;
- d. perencanaan dan penentuan keputusan kelompok pelaksana program;
- e. koordinasi dengan instansi terkait program;
- f. akses data untuk penentuan keputusan program;
- g. teknis pelaksanaan program sesuai keputusan bersama;
- h. pendistribusian manfaat dan keuntungan program;
- i. monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat;
- j. mekanisme perbaikan program; serta
- k. mekanisme resolusi konflik yang timbul dari adanya program.

Pada bagian ini juga akan dilakukan analisis pemetaan *stakeholder* untuk mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan oleh perusahaan kepada *stakeholder*. Analisis ini dilakukan dengan mengadopsi Matriks *Power-Interest* yang banyak digunakan untuk mengkaji peran *stakeholder* bagi kegiatan perusahaan. Kuadran I menunjukkan skor tinggi untuk pengaruh dan dampak dimana *stakeholder* pada kuadran ini dikategorikan sangat penting. *Stakeholder* ini menjadi aktor utama yang harus mendapatkan kepuasan dari program TJSL. Tindakan perusahaan kepada *stakeholder* pada kuadran ini adalah dengan berkolaborasi (*collaborate*) untuk keberlangsungan program. Kuadran II menunjukkan *stakeholder* yang memiliki skor dampak tinggi meskipun pengaruh terhadap program rendah. *Stakeholder* pada kuadran ini perlu untuk dilibatkan (*involve*) dalam program. Sementara itu, *stakeholder* pada kuadran III dikategorikan cukup penting karena memiliki skor dampak rendah namun skor pengaruh tinggi

terhadap program. Perusahaan perlu melakukan konsultasi (*consult*) terkait program dengan *stakeholder* pada kuadran ini. Pada kuadran IV, *stakeholder* memiliki nilai dampak dan pengaruh rendah sehingga tindakan yang perlu dilakukan adalah tetap menginformasikan program (*inform*).

Program TJSL yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur di Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pengembangan daerah wisata Pantai Ambalat. Potensi sumber daya alam Pantai Ambalat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Amborawang Laut. Aktor-aktor yang berpengaruh dalam pengembangan wisata Pantai Ambalat terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Sebaran Nilai berdasar Aktor di Kelurahan Amborawang Laut

No	Aktor	Kelurahan Amborawang Laut	
		Pengaruh	Dampak
1	Kepala kampung	Sedang	Tinggi
2	Bumdes	Tinggi	Tinggi
3	Ketua RT	Rendah	Rendah
4	Patron	Sedang	Sedang
5	Dinas teknis	Rendah	Rendah
6	Tokoh agama	Rendah	Rendah
7	Tokoh adat	Rendah	Rendah
8	Tokoh LSM	Rendah	Rendah
9	Tokoh perempuan	Rendah	Sedang
10	Kelompok pengguna SDA	Rendah	Rendah

Sumber: diolah dari data primer (2022)

Bumdes merupakan satu-satunya aktor yang dipersepsikan memiliki pengaruh dengan kategori tinggi. Artinya, Bumdes mendominasi dalam tahapan perencanaan dan penentuan pengembangan wisata Pantai Ambalat, antara lain memiliki pengaruh dalam menentukan jenis program, pembiayaan program, menentukan alokasi sumber daya, memilih pelaksana

program, melakukan koordinasi antar instansi, melakukan monitoring dan evaluasi, menentukan mekanisme perbaikan program, maupun melakukan resolusi konflik jika terjadi friksi atau konflik. Adapun aktor-aktor yang tingkat pengaruhnya pada kategori sedang adalah kepala kampung/kepala desa, dan juragan. Dari aktor-aktor yang memiliki pengaruh pada kategori tinggi dan sedang, memperlihatkan bahwa aktor-aktor tersebut terlibat atau berkepentingan secara langsung dengan pengembangan wisata pantai Ambalat.

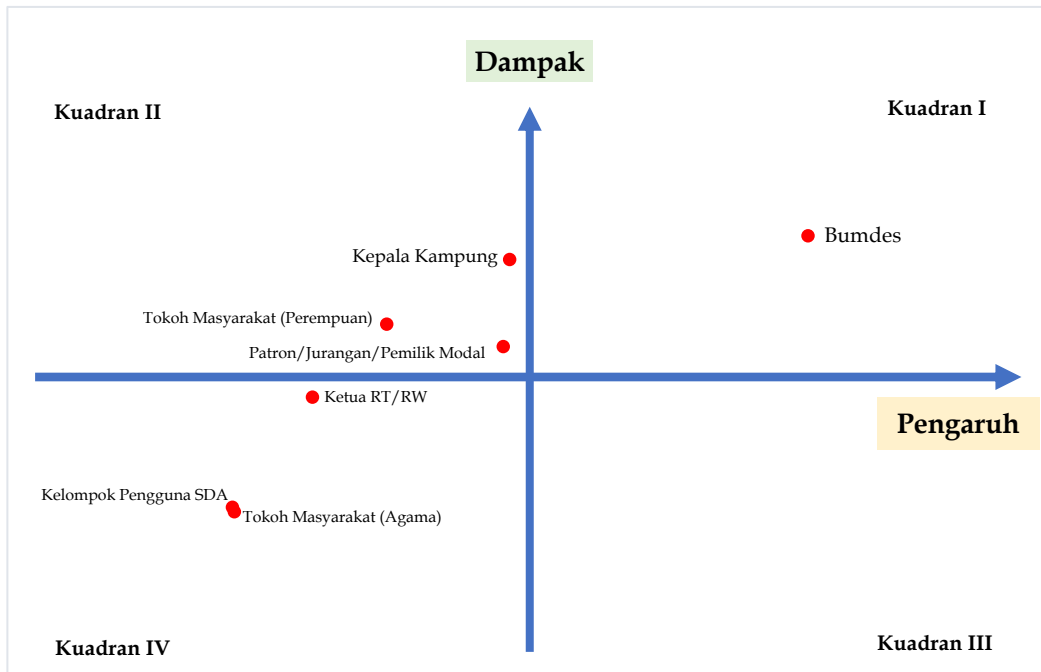
Tingkat pengaruh aktor-aktor lain yakni ketua RT, dinas teknis, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat/LSM pada kategori rendah menurut persepsi responden. Aktor-aktor ini tidak bersentuhan langsung dengan urusan wisata dan tidak memiliki pengaruh terhadap program, karena bisa jadi merasa tidak berkepentingan secara langsung dengan kegiatan wisata. Bahkan dinas teknis yang terkait wisata pun belum menunjukkan keterlibatan dan pengaruhnya dalam pengembangan wisata Pantai Ambalat menurut para responden.

Tingkat pengaruh kepala kampung dan patron dalam Program Pengembangan Desa Wisata berada pada peringkat sedang. Kepala kampung memiliki pengaruh pada program, karena statusnya sebagai pemimpin formal di tingkat desa/kelurahan. Kepala kampung harus terlibat dalam proses pembangunan yang dilakukan di wilayah kerjanya. Hal ini agak berbeda dengan juragan atau patron. Berdasar kajian pendalaman secara kualitatif di lapangan ditemukan bahwa patron/ juragan --yang juga menjabat sebagai ketua LPM-- sering memberikan bantuan kepada para nelayan dan masyarakat pada umumnya di Kelurahan Amborawang. Para nelayan biasanya mendapat pinjaman modal atau alat produksi dari juragan. Beberapa bantuan yang dirasakan oleh masyarakat umum adalah proyek semenisasi jalan, pengembangan PAUD, dan Posyandu lansia. Juragan ini dikenal memiliki jaringan sosial yang luas, sehingga bisa menjadi perantara untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak luar untuk pembangunan di

desa. Kuatnya modal yang dimiliki juragan dan statusnya sebagai ketua LPM, dan luasnya jaringan sosial yang dimiliki membuatnya memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menentukan program wisata.

Adapun pada indikator dampak program wisata pantai kepada aktor memperlihatkan bahwa aktor yang terdampak kategori tinggi adalah Bumdes, sedangkan aktor yang terdampak pada kategori sedang adalah kepala kampung, patron, dan perempuan. Bumdes sebagai aktor yang terdampak kategori tinggi ini bersentuhan langsung dengan kegiatan pengembangan wisata pantai. Keberhasilan maupun kegagalan program wisata akan berdampak pada Lembaga Bumdes, dan berdampak pula pada kepala kampung, patron, dan kelompok perempuan. Kelompok perempuan tidak memiliki pengaruh pada program, namun terdampak dari program desa wisata.

Lebih lanjut, gambar di bawah ini menunjukkan peta kepentingan *stakeholder* terhadap Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra di Desa Wisata Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang, Laut Kecamatan Samboja Kabupaten, Kutai Kartanegara. *Stakeholder* utama yang terdapat di Kuadran I adalah Bumdes. Sementara di kuadran II terdapat Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat (Perempuan) dan Patron/Juragan/Pemilik Modal yang dapat dilibatkan dalam pengembangan program TJSL. Dalam hal ini, pengaruh aktor perempuan dapat menjadi rekomendasi bagi TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra untuk lebih ditingkatkan sesuai dengan amanat SDGs. Peningkatan peran tersebut dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi (UMKM) di lingkungan Pantai Ambalat. Sementara aktor lain seperti Ketua RT/RW, Kelompok Pengguna SDA dan Tokoh Agama berada pada kuadran IV. Hal ini dapat menjadi catatan sebab Ketua RT/RW yang berada pada struktur pemerintah semestinya berada pada kuadran II atau kuadran III.



Gambar 3 Peta Stakeholder Desa Wisata Pantai Ambalat berdasarkan Indikator Dampak dan Pengaruh terhadap Program TJSL
 Sumber: diolah dari data primer (2022)

4.2.2. Analisis Dinamika Kelompok

Analisis dinamika kelompok adalah kajian interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan faktor terjadinya hubungan kelompok sosial. Selain itu, analisis ini juga mengkaji perilaku dan tindakan yang dinamis dalam struktur sosial masyarakat, termasuk kelembagaan sosial di dalam masyarakat. Bagian penting dari analisis dinamika kelompok adalah potensi solidaritas yang mendukung pengembangan kelompok ke satu tujuan untuk kesejahteraan bersama, atau sebaliknya, berupa friksi yang menghambat pengembangan masyarakat.

A. Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Penelitian

Usaha ekonomi yang dikelola masyarakat secara berkelompok di lokasi penelitian. Usaha yang dijalankan oleh kelompok masyarakat di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara antara lain budidaya ikan (Kelompok Sinar Bahari), peternakan sapi (Kelompok Handil Sejahtera), makanan olahan -

peyek, saus, dan sambal kacang (Kelompok Wanita), dan pengelolaan wisata pantai (Pokdarwis Karya). Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara umum berada pada level yang berbeda di setiap kelompok. Kemampuan masyarakat dalam mengelola kelompok usaha akan menjadi salah satu acuan dalam melakukan pengembangan usaha ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang.

B. Analisis Dinamika Kelompok

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan agensi pembangunan adalah melalui pendekatan kelompok. Hal ini linier dengan rekomendasi yang disampaikan oleh para ahli pengembangan masyarakat bahwa pendekatan kelompok lebih dipandang lebih efektif dalam memfasilitasi pembentukan interaksi dan proses belajar para anggota sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif dan kompetitif. Saat ini, kebanyakan kelompok terbentuk secara insidental dan dirangsang dari atas karena keperluan untuk mengakses bantuan. Sebagai proses awal, hal ini dapat dipahami sebagai strategi percepatan penguatan partisipasi masyarakat, namun di sisi lain kondisi ini memerlukan pengembangan kapasitas dan penguatan sistem manajemen sehingga kelompok bertransformasi menjadi kelompok yang dinamis dalam merespon potensi dan peluang perkembangan di masa depan.

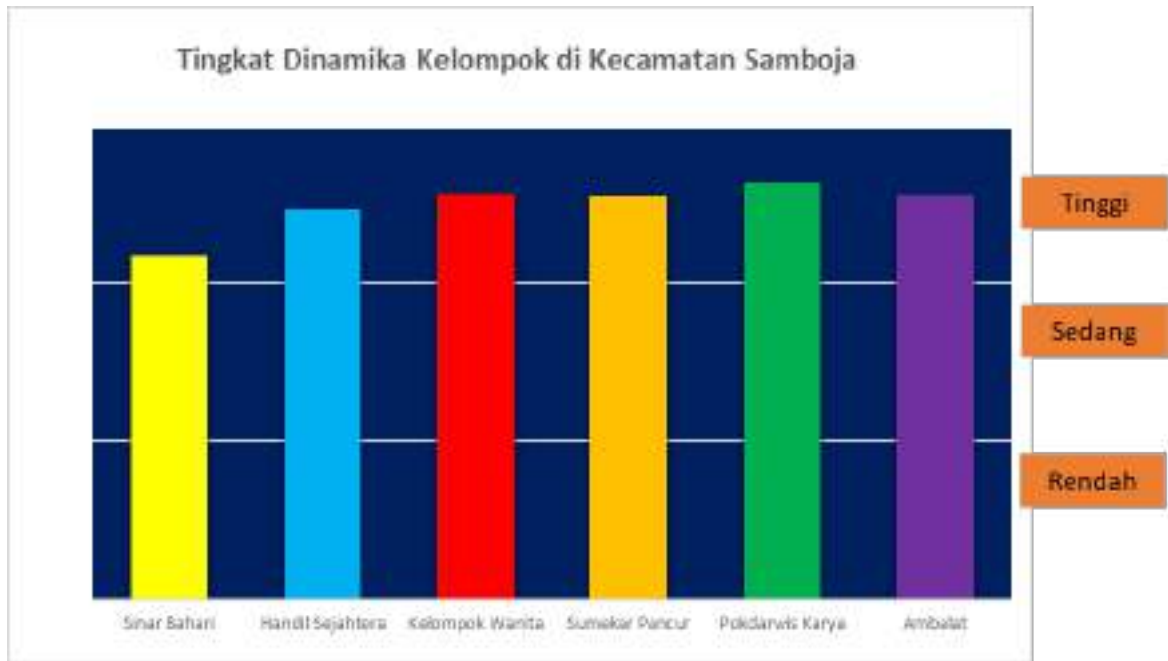
Tabel 9 Rentang Nilai Indikator Dinamika Kelompok

No	INDIKATOR	Rentang Nilai		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	TUJUAN KELOMPOK (Keidentikan tujuan dalam kelompok)	2 - 4	5 - 6	7 - 10
2	STRUKTUR KELOMPOK (Kejelasan pembagian tugas, pengambilan keputusan, fungsi komunikasi internal)	3 - 6	7 - 10	11 - 15
3	FUNGSI TUGAS (Fasilitasi pemenuhan kebutuhan anggota, mekanisme mediasi konflik)	6 - 13	14 - 21	22 - 30

No	INDIKATOR	Rentang Nilai		
		Rendah	Sedang	Tinggi
	AKSES INFORMASI			
4	(Intensitas pencarian informasi pada beragam sumber belajar)	6 - 13	14 - 21	22 - 30
	PEMELIHARAAN - PENGEMBANGAN KELOMPOK			
5	(Kontrol internal, peluang perekrutan, komunikasi eksternal)	3 - 6	7 - 10	11 - 15
	KESATUAN DAN KEKOMPAKAN KELOMPOK			
6	(keterikatan kultural, kemiripan identitas, keterpaduan kegiatan)	6 - 13	14 - 21	22 - 30
	SUASANA KELOMPOK			
7	(Mekanisme penyelesaian masalah, kualitas hubungan antar unsur kelompok)	2 - 4	5 - 6	7 - 10
	KETAATAN KELOMPOK			
8	(Eksistensi aturan kelompok, kesadaran mentaati aturan kelompok)	2 - 4	5 - 6	7 - 10
	MAKSUD TERSEMBUNYI			
9	(Tujuan tersembunyi anggota di dalam kelompok)	2 - 4	5 - 6	7 - 10
TINGKAT DINAMIKA KELOMPOK		32 - 47	75 - 116	117 - 160

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebaran indikator dinamika kelompok yang terdapat di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kelompok masyarakat Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Mancur, dan Pokdarwis Karya disajikan pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 4 Sebaran Indikator Dinamika Kelompok di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 10 Sebaran Indikator Dinamika Kelompok di Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara

No	INDIKATOR	Kelompok					Kec. Samboja
		Sinar Bahari	Handil Sejahtera	Kelompok Wanita	Sumekar Pancur	Pokdarwis Karya	
1	TUJUAN KELOMPOK (Keidentikan tujuan dalam kelompok)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	STRUKTUR KELOMPOK (Kejelasan pembagian tugas, pengambilan keputusan, fungsi komunikasi internal)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	FUNGSI TUGAS (Fasilitasi pemenuhan kebutuhan anggota, mekanisme mediasi konflik)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

No	INDIKATOR	Kelompok					Kec. Samboja
		Sinar Bahari	Handil Sejahtera	Kelompok Wanita	Sumekar Pancur	Pokdarwis Karya	
4	AKSES INFORMASI (Intensitas pencarian informasi pada beragam sumber belajar)	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	PEMELIHARAAN - PENGEMBANGAN KELOMPOK (Kontrol internal, peluang perekrutan, komunikasi eksternal)	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
6	KESATUAN DAN KEKOMPAKAN KELOMPOK (keterikatan kultural, kemiripan identitas, keterpaduan kegiatan)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
7	SUASANA KELOMPOK (Mekanisme penyelesaian masalah, kualitas hubungan antar unsur kelompok)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	KETAATAN KELOMPOK (Eksistensi aturan kelompok, kesadaran mentaati aturan kelompok)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	MAKSUD TERSEMBUNYI (Tujuan tersembunyi anggota di dalam kelompok)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
TINGKAT DINAMIKA KELOMPOK		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: data primer yang diolah (2022)

a. Tujuan Kelompok

Pada indikator tujuan kelompok, secara umum persepsi anggota kelompok masyarakat Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Pancur, dan Pokdarwis Karya di Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja memiliki pemahaman yang sangat baik. Anggota kelompok masyarakat dianggap memiliki tujuan pribadi yang sangat identik dengan tujuan kelompok. Anggota kelompok memiliki persepsi bahwa tujuan yang sangat identik antara kelompok dan anggota akan membantu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Struktur Kelompok

Pada anggota seluruh kelompok masyarakat Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Pancur, dan Pokdarwis Karya memiliki persepsi yang sangat baik atau dalam kategori tinggi terhadap penilaian struktur kelompok. Masing-masing anggota telah memiliki penilaian yang sangat baik terhadap keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan, pembagian tugas dan ketersediaan sarana dan berinteraksi. Anggota kelompok menilai bahwa pengambilan keputusan dan sarana interaksi telah memiliki mekanisme yang sangat baik, dan sebaiknya terus dipertahankan sehingga dapat memberikan manfaat di masa depan.

c. Fungsi Tugas

Persepsi anggota kelompok masyarakat Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Pancur, dan Pokdarwis Karya terhadap indikator fungsi tugas kelompok adalah sangat baik atau masuk dalam kategori tinggi terhadap peran kelompok dalam mengakomodasi kebutuhan kerja kelompoknya. Mayoritas anggota kelompok masyarakat yang menjadi anggota kelompok

memiliki persepsi yang sangat memuaskan atas fungsi kelompok dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan, penyediaan lapangan kerja dan pemecahan masalah di dalam kelompok. Anggota kelompok juga merasa puas dengan mekanisme penyelesaian masalah di dalam kelompok.

d. Akses Informasi

Pada indikator akses informasi kelompok, anggota kelompok masyarakat Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Pancur, dan Pokdarwis Karya menunjukkan sikap dan perilaku yang aktif atau dalam kategori tinggi. Anggota kelompok masyarakat sangat aktif dalam mencari informasi yang terkait dengan kegiatan kelompok, sebagai upaya dalam pengembangan keahlian pribadi dan kapasitas kelompok. Upaya pencarian informasi yang sebaiknya dilakukan oleh anggota kelompok masyarakat adalah mencari informasi dari berbagai sumber, antara lain tokoh masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta yang memiliki tingkat kepercayaan informasi yang tinggi. Selain itu, akses informasi juga dapat diperoleh melalui media cetak maupun media elektronika yang berbasis internet.

e. Pemeliharaan dan Pengembangan Kelompok

Pada indikator pemeliharaan dan pengembangan kelompok, seluruh anggota kelompok masyarakat Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Pancur, dan Pokdarwis Karya menunjukkan persepsi yang sangat baik atau dalam kategori tinggi. Anggota kelompok merasakan pengurus telah terbuka dalam menerima masukan dari anggota lain dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan kelompok. Anggota kelompok juga menilai bahwa kelompok telah terbuka dalam perekrutan anggota baru yang ingin bergabung, selama calon anggota tersebut

memiliki nilai dan tujuan kelompok yang sangat identik. Selain itu, kelompok juga telah menunjukkan upaya yang sangat baik dalam membangun komunikasi dengan pihak eksternal untuk memperluas jaringan.

f. Kesatuan dan Kekompakan Kelompok

Pada indikator kesatuan dan kekompakan kelompok, anggota kelompok Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Pancur, dan Pokdarwis Karya masuk dalam kategori tinggi. Anggota kelompok tersebut memiliki persepsi bahwa kelompok telah sangat baik dalam hal kepemilikan modal sosial dasar. Hal tersebut terlihat pada keterikatan anggota yang baik secara kultural/nilai budaya, kemiripan identitas dan keterikatan ekologi dalam bentuk ketergantungan pada sumberdaya dan ruang hidup yang sama.

g. Suasana Kelompok

Pada indikator suasana kelompok, seluruh anggota kelompok masyarakat Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Pancur, dan Pokdarwis Karya memiliki persepsi yang sangat baik dan masuk dalam kategori tinggi. Dalam pandangan anggota kelompok, kepemimpinan telah berjalan dengan sangat baik dan telah mampu memberikan inspirasi pada seluruh pengurus dan anggota. Hubungan antar individu anggota kelompok juga telah berkembang dengan baik dan mengarah pada pola kerjasama sebagai upaya peningkatan produktivitas kerja anggota kelompok.

h. Ketaatan Kelompok

Secara keseluruhan, persepsi anggota kelompok masyarakat Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Pancur, dan Pokdarwis Karya terhadap indikator ketaatan kelompok adalah

positif dan dalam kategori tinggi. Anggota menganggap bahwa kelompok telah bekerja secara legal dan tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan. Anggota kelompok telah memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan aktivitas ekonomi yang tidak bersifat destruktif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan karena manfaat jangka panjang.

i. Maksud Tersembunyi

Pada kelompok Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Pancur, dan Pokdarwis Karya berada dalam kategori sedang. Anggota kelompok yang berada pada kategori sedang masih ada yang memiliki maksud tersembunyi yang berbeda dengan tujuan pendirian dan aktifitas yang dilakukan oleh kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih belum memahami dengan baik maksud pendirian dan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok atau dengan kata lain visi dan misi kelompok cukup baik tersampaikan kepada anggota. Nilai - nilai kelompok ini kemudian menjadi pedoman anggota dalam berinteraksi dan beraktivitas.

4.2.3. Analisis Finansial dan Kesejahteraan Masyarakat

Keragaan ekonomi usaha masyarakat di Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum bergerak di bidang perikanan tangkap, pertanian sayuran, makanan olahan dan peternakan sapi. Usaha-usaha telah lama ditekuni masyarakat sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan. Analisis finansial dari seluruh usaha ekonomi masyarakat tersebut dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Analisis Finansial Usaha Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Amborawang Laut selama 5 tahun

No	Jenis Usaha	Kriteria Investasi			Ket.
		NPV (Rp)	IRR	Net BCR	
1	Nelayan rengge	89.926.369	274%	13,6	Layak
2	Pertanian (sayuran)	83.723.770	127%	6,43	Layak
3	Makanan olahan	28.064.124	505%	25,27	Layak
4	Peternakan sapi	175.038.701	286%	14,24	Layak

Sumber: data primer yang diolah (2022)

1. Nelayan Rengge

Biaya investasi yang yang dikeluarkan dalam usaha perikanan alat tangkap rengge seperti kapal, mesin kapal, dan rengge. Sementara itu untuk biaya operasional terdiri dari bahan bakar minyak (BBM), dan konsumsi. Berdasarkan hasil analisis usaha perikanan alat tangkap rengge diperkirakan memperoleh penerimaan sebesar Rp 39.000.000/tahun, dengan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 8.970.000/tahun, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha perikanan alat tangkap rengge diperkirakan sebesar Rp 30.345.000/tahun. Untuk keragaan ekonomi usaha usaha perikanan alat tangkap rengge sebagai berikut:

a. *Net Present Value (NPV)*

NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Hasil analisis data menghasilkan nilai *NPV* pada usaha perikanan alat tangkap rengge sebesar Rp 89.926.369, artinya keuntungan dari usaha perikanan alat tangkap rengge untuk jangka waktu 5 tahun ke

depan sebesar Rp 89.926.369 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha alat tangkap rengge layak untuk dilanjutkan berdasarkan nilai $NPV > 0$.

b. *Internal rate of Return (IRR)*

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan *benefit* dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria $IRR > OCC$. Analisis finansial yang dilakukan pada usaha perikanan alat tangkap rengge menghasilkan nilai *IRR* sebesar 274% dengan *OCC* sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha perikanan alat tangkap rengge, akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 274%, sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan, bila dibandingkan dengan *OCC* sebesar 15%.

c. *Net Benefit Cost Ratio (Net BCR)*

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha perikanan alat tangkap rengge ini menghasilkan nilai *Net BCR* sebesar 13,6. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan alat tangkap rengge mampu memberikan *net benefit* sebesar 13,6 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan, atau penafsiran lainnya adalah Rp 1.000 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar Rp 13.600 selama usaha tersebut berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan berdasarkan nilai $Net BCR > 1$.

2. Usaha Pertanian Sayuran

Usaha pertanian yang dilakukan masyarakat adalah menanam kacang, timun, dan cabe. Biaya Investasi yang yang dikeluarkan dalam usaha pertanian seperti lahan pertanian dan alat pertanian. Sementara itu untuk biaya operasional terdiri dari pupuk dan bibit. Berdasarkan hasil analisis usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat diperkirakan memperoleh penerimaan sebesar Rp 40.432.000/tahun, dengan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 10.809.792/tahun, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha pertanian diperkirakan sebesar Rp 29.622.208/tahun. Untuk keragaan ekonomi usaha pertanian sebagai berikut:

a. *Net Present Value (NPV)*

NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Hasil analisis data menghasilkan nilai *NPV* pada usaha pertanian sebesar Rp 83.723.770, artinya keuntungan dari usaha pertanian untuk jangka waktu 5 tahun ke depan sebesar Rp 83.723.770 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha pertanian layak untuk dilanjutkan berdasarkan nilai $NPV > 0$.

b. *Internal rate of Return (IRR)*

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan *benefit* dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria $IRR > OCC$. Analisis finansial yang dilakukan pada usaha pertanian menghasilkan nilai *IRR* sebesar 127% dengan *OCC* sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha pertanian, akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 127%, sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan, bila dibandingkan dengan *OCC* sebesar 15%.

c. *Net Benefit Cost Ratio (Net BCR)*

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha pertanian ini menghasilkan nilai *Net BCR* sebesar 6,43. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha pertanian mampu memberikan *net benefit* sebesar 6,43 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan, atau penafsiran lainnya adalah Rp 1.000 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar Rp 6.430 selama usaha tersebut berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan berdasarkan nilai *Net BCR* > 1.

3. Usaha Makanan Olahan

Berdasarkan hasil analisis pada usaha makanan olahan yang memproduksi peyek dan bumbu pecel diperkirakan memperoleh penerimaan sebesar Rp 12.000.000/tahun, dengan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 680.000/tahun, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha makanan olahan diperkirakan sebesar Rp 3.103.000/tahun. Untuk keragaan ekonomi usaha makanan olahan sebagai berikut:

a. *Net Present Value (NPV)*

NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Hasil analisis data menghasilkan nilai *NPV* pada usaha makanan olahan sebesar Rp 28.064.124, artinya keuntungan dari usaha makanan olahan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan sebesar Rp 28.064.124 bila

dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha makanan olahan layak untuk dilanjutkan berdasarkan nilai $NPV > 0$.

b. *Internal rate of Return (IRR)*

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan *benefit* dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria $IRR > OCC$. Analisis finansial yang dilakukan pada usaha makanan olahan menghasilkan nilai *IRR* sebesar 505% dengan *OCC* sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha makanan olahan, akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 505%, sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan, bila dibandingkan dengan *OCC* sebesar 15%.

c. *Net Benefit Cost Ratio (Net BCR)*

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha makanan olahan ini menghasilkan nilai *Net BCR* sebesar 25,27. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha makanan olahan mampu memberikan *net benefit* sebesar 25,27 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan, atau penafsiran lainnya adalah Rp 1.000 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar Rp 25.270 selama usaha tersebut berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan berdasarkan nilai $Net BCR > 1$.

4. Usaha Pembesaran Sapi

Biaya investasi yang yang dikeluarkan dalam usaha pembesaran sapi seperti kandang, ember, arit, tali, dan cangkul. Sementara itu untuk biaya operasional terdiri dari bibit sapi, bahan bakar minyak (BBM), dan konsumsi. Berdasarkan hasil analisis usaha pembesaran sapi diperkirakan memperoleh penerimaan sebesar Rp 128.000.000/tahun, dengan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 70.340.000/tahun. Untuk keragaan ekonomi usaha usaha pembesaran sapi sebagai berikut:

a. *Net Present Value (NPV)*

NPV merupakan selisih antara manfaat (*benefit*) dengan biaya (*cost*) yang telah dijadikan nilai sekarang. Hasil analisis data menghasilkan nilai *NPV* pada usaha pembesaran sapi sebesar Rp 175.038.701, artinya keuntungan dari usaha pembesaran sapi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan sebesar Rp 175.038.701 bila dihitung pada saat sekarang. Dengan demikian, usaha pembesaran sapi layak untuk dilanjutkan berdasarkan nilai *NPV* > 0.

b. *Internal rate of Return (IRR)*

IRR menunjukkan kemampuan modal untuk memberikan *benefit* dalam bentuk tingkat diskonto, dengan kriteria $IRR > OCC$. Analisis finansial yang dilakukan pada usaha pembesaran sapi menghasilkan nilai *IRR* sebesar 286% dengan *OCC* sebesar 15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modal investasi yang ditanamkan pada usaha pembesaran sapi, akan mampu memberikan keuntungan selama usaha berlangsung yaitu sebesar 286%, sehingga usaha ini layak untuk dilanjutkan, bila dibandingkan dengan *OCC* sebesar 15%.

c. *Net Benefit Cost Ratio (Net BCR)*

Net BCR merupakan perbandingan antara manfaat bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bernilai positif yang merupakan keuntungan setelah usaha berjalan, dengan biaya bersih yang telah dijadikan nilai sekarang (*present value*) yang bersifat negatif yang merupakan biaya investasi. Usaha pembesaran sapi ini menghasilkan nilai *Net BCR* sebesar 14,24. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha pembesaran sapi mampu memberikan *net benefit* sebesar 14,24 kali dari biaya investasi yang telah dikeluarkan, atau penafsiran lainnya adalah Rp 1.000 modal investasi mampu menghasilkan *net benefit* sebesar Rp 14.240 selama usaha tersebut berlangsung. Dengan demikian, usaha yang dijalankan layak untuk dilanjutkan berdasarkan nilai *Net BCR* > 1.

4.2.4. Analisis *Community Relations*

Community relations (Comrel) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk menjaga hubungan dengan komunitas yang ada di lingkungannya yang berorientasi pada suatu kegiatan yang dilakukan secara partisipatif oleh Humas. Salah satu bentuk lain dari kegiatan *Comrel* ini adalah pengembangan masyarakat yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang. Hal ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam rangka menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar, seperti yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UIW Kaltimra.

Community relations atau hubungan dengan komunitas dipandang sebagai relasi yang penting untuk dikembangkan demi membuka ruang bagi terwujudnya tanggung jawab sosial suatu organisasi atau perusahaan (Yudarwati, 2013). Tanggung jawab tersebut terus mengalami evolusi

sehingga menemukan keseimbangan dan kesetaraan posisi antara organisasi dan komunitasnya (Iriantara, 2013). Selain itu, Peak berpendapat bahwa *community relations* adalah suatu bentuk partisipasi lembaga yang bersifat terencana, aktif, dan terus menerus dengan masyarakat di mana ia berada, dalam rangka memelihara dan meningkatkan kondisi dan situasi lingkungannya agar memperoleh keuntungan bersama baik itu bagi organisasi maupun juga komunitas tersebut (Lattimore & Baskin, 2010). Sedangkan menurut Ruslan, *community relations* mencakup kegiatan pembinaan hubungan baik dengan penduduk atau masyarakat, setidaknya mereka yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan (Salim, 2014). Berdasarkan berbagai konsepsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *community relations* merupakan hubungan yang dibangun oleh organisasi atau perusahaan dengan komunitas yang berorientasi pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan secara partisipatif untuk meminimalisir perbedaan konsepsi dan pikiran antara masyarakat, korporat dan pemerintah, demi kemaslahatan bersama.

Oleh sebab itu menurut Sinaga et al. (2015), *community relations* tidak dapat dipisahkan dengan program *corporate social responsibility*. *Community relations* dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosial atau bahkan masuk dalam isu-isu publik. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebatas memberikan bantuan agar organisasi dapat diterima oleh masyarakat, tetapi bagaimana organisasi mampu memberikan pemahaman mengenai bantuan yang diberikan. Dalam hal ini analisis *community relations* dibagi menjadi 1) Faktor komunikasi, 2) Faktor keterdedahan atau umpan balik, 3) Faktor ekspektasi atau harapan masyarakat, dan 4) Faktor persepsi terhadap program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT PLN (Persero) UIW Kaltimra.

Penerima manfaat program TJSL PT PLN (Persero) pada tahun 2022 ini adalah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Karya Ambalat yang menerima sejumlah pelengkap fasilitas wisata berupa *flying fox*, *skybike*, rehabilitasi bangunan Ambalat Center dan pengadaan barang UMKM Karya Ambalat. Program bantuan ini diharapkan bisa membantu meningkatkan potensi keberadaan pantai wisata Ambalat sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Melalui Pokdarwis Karya Ambalat, Kelurahan Amborawang Laut diakui telah cukup berhasil memberikan kontribusi bagi daerah melalui kegiatan kepariwisataan yang ada di wilayah setempat. Meskipun mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai pekebun dan nelayan, tetapi waktu luang yang mereka miliki dimanfaatkan untuk mengelola Pantai Ambalat yang dijadikan tujuan kunjungan bagi warga masyarakat Kalimantan Timur.

Hasil analisis faktor-faktor *community relations* dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi

Sebagai bentuk evaluasi dari program yang diberikan dalam konteks hubungan komunitas, berdasarkan hasil penggalian data di lapangan terkait **Faktor Komunikasi** yang dilakukan di Desa Wisata Pantai Ambalat, Kelurahan Desa Amborawang Laut menunjukkan bahwa sebagian informan dari total 29 orang menyampaikan bahwa mereka memahami PT PLN merupakan lembaga pelayanan publik yang bertanggung jawab penuh atas pelayanan listrik untuk masyarakat sehingga memiliki kewajiban untuk menyediakan energi listrik yang handal bagi konsumennya sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sementara sebagian lainnya beranggapan bahwa PT PLN (Persero) merupakan entitas bebas

yang mengendalikan kekuasaan organisasinya secara langsung, sehingga perusahaan dianggap memiliki kebebasan menentukan visi dan misi organisasinya. Namun demikian hanya 2 informan yang menyatakan memiliki keluarga yang bekerja di PT PLN (Persero) yang berada pada tingkat menengah, tetapi juga tidak berarti informan tersebut bisa mendapatkan kemudahan ketika berurusan dengan perusahaan.

2. Faktor Keterdedahan atau Umpan Balik

Dari **Faktor Keterdedahan atau Umpan balik** terkait Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, 17% informan menyatakan mulai mendapatkan informasi sejak tahun 2022, 48% informan sejak tahun 2021 lalu, 14% informan sejak tahun 2020, 17% informan sejak tahun 2019, dan hanya 1 orang yang mengaku mengetahui sejak tahun 2018 lalu. Sumber informasi masyarakat akan program ini diakui oleh 28% informan berasal dari aparat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagaimana yang diakui oleh 66% informan, dan hanya Bapak Lurah yang menyatakan mendapatkan informasi langsung dari pegawai PT PLN (Persero). Terkait dengan frekuensi informasi program TJSL, sekitar 55% informan menyatakan sudah cukup sering mendapatkan informasi terkait, dan hanya 3 orang informan (10%) yang kebetulan ketiganya merupakan tokoh agama setempat yang menyatakan hampir tidak pernah mendapatkan info terkait. Selain itu 45% informan menyatakan aktif mencari informasi terkait program TJSL, dan hanya 14% informan yang tidak terlalu peduli terhadap program. Namun demikian 52% informan menyatakan tidak memiliki harapan apapun terhadap program TJSL PT PLN (Persero). Selain itu, hanya 24% informan yang mengakui menerima informasi terkait program TJSL perusahaan langsung

dari pegawai PT PLN (Persero). 79% informan mengakui kalau mereka mendapatkan informasi lebih banyak dari para tokoh masyarakat setempat atau dari aparat kelurahan. Sehingga mayoritas (93%) informan meyakini jika PT PLN (Persero) memang memilih untuk tidak memberikan informasi secara langsung sehingga hanya diberikan kepada perwakilan masyarakat saja. Jikapun PT PLN (Persero) mengadakan pertemuan untuk menyampaikan informasi terkait program TJSL kepada masyarakat di wilayah ini, 90% informan menyatakan hal tersebut jarang sekali dilakukan dan diasumsikan hanya 1-3 kali dalam setahun. Adapun informasi terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat merupakan jenis informasi yang banyak dicari oleh masyarakat yang aktif mencari informasi terkait program TJSL PT PLN (Persero) sebagaimana diyakini oleh 83% informan. Meskipun demikian sumber lain di luar perusahaan merupakan referensi yang kerap digunakan oleh masyarakat sebagaimana disampaikan oleh 90% informan, yang umumnya merupakan tokoh-tokoh masyarakat, aparat kelurahan, atau jika memungkinkan dari kenalan mereka yang bekerja di kantor PT PLN (Persero). Salah satu catatan pentingnya adalah hanya 30% informan yang meyakini bahwa mereka bisa menyampaikan harapan atau pertanyaan terkait program secara langsung kepada PT PLN (Persero), dan hanya 48% yang meyakini bahwa para tokoh masyarakat atau aparat pemerintahan menjadi mediator penyampai harapan dan aspirasi, dimana kemudian hanya 7% informan yang percaya bahwa berbagai pertanyaan, harapan atau aspirasi tersebut mendapatkan tanggapan dari perusahaan. Kemudian atas respon yang diberikan oleh PT PLN (Persero) tersebut atas pertanyaan dan harapan masyarakat, hanya 10% informan yang merasa puas terhadap tanggapan tersebut.

Sedangkan sebagian informan yang merasa tidak puas atas respon yang diberikan oleh perusahaan menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh perusahaan baru berupa fasilitas umum, belum benar-benar menyentuh ke pemberdayaan masyarakat (Sdr. EN), dan hanya terfokus di Pantai Ambalat saja. Padahal menurut Sdr. AH ada potensi untuk meningkatkan dan memberdayakan pariwisata hutan mangrove yang ada di sekitar wilayah tersebut agar bantuan terasa lebih merata. Sehingga menurut para informan beberapa hal yang yang bisa dilakukan untuk meningkatkan aliran komunikasi antara PT PLN (Persero) dan masyarakat adalah perlunya melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat sekitar, atau secara rutin melakukan diskusi dengan para *opinion leaders* seperti para RT dan tokoh-tokoh masyarakat baik itu tokoh perempuan, tokoh agama, aparat pemerintahan, pengusaha lokal, tokoh pendidikan, dan pemuka adat setempat.

3. Faktor Harapan

Terkait dengan **Faktor Harapan**, dalam konteks hubungan komunitas yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) semua informan satu suara menyatakan bahwa bantuan yang pernah diberikan oleh perusahaan adalah program TJSI yang terdiri dari 3 tahapan yang kesemuanya fokus untuk pengembangan sektor kepariwisataan di Pantai Ambalat berupa fasilitas umum seperti jembatan, mushola, gapura, sepeda listrik, *flying fox*, gazebo, dan lain sebagainya. Sehingga mayoritas informan yang diwawancara menyatakan bahwa program TJSI PT PLN (Persero) telah memenuhi hampir sebagian besar harapan mereka, dan hanya 14% yang menyatakan sebaliknya. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan yang diberikan telah mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat,

membantu kesediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan pengelolaan lingkungan yang bijaksana dan berkelanjutan. Meskipun demikian para informan masih memiliki harapan khusus terhadap program TJSL PT PLN (Persero), di mana mereka berharap agar perusahaan kedepannya bisa memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan dan pelayanan kesehatan murah, serta pembangunan infrastruktur yang lengkap. Selain itu harapan akan adanya beasiswa berprestasi dan pelatihan bagi nelayan lokal, pendampingan UMKM yang memiliki kekhasan lokal, membantu menciptakan tempat wisata hutan mangrove dan pengembangan hutan bekantan, serta membangun tempat ibadah. Berdasarkan berbagai pengalaman yang ada, maka 97% informan sepakat kalau PT PLN (Persero) selama ini sudah berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program TJSL-nya karena sejak ada bantuan dari perusahaan jumlah pengunjung di Pantai Ambalat semakin meningkat sehingga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar yang berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya bagi para ibu rumah tangga dan para petani lokal. Namun demikian dari 29 informan yang diwawancarai, hanya 2 informan saja yang mengaku pernah terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai oleh PT PLN (Persero) dari proses perencanaan hingga realisasi program. Sementara sebagian informan lainnya menyatakan hanya hadir saat peresmian kegiatan. 38% informan menyatakan mereka tidak terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut karena mereka terlalu fokus dengan kegiatan mereka masing-masing dan juga karena tidak terlibat dalam kelompok penerima manfaat program.

4. Aspek Persepsi

Terkait dengan **aspek persepsi** masyarakat terhadap program TJSL PT PLN (Persero), mayoritas informan menyepakati jika program perusahaan bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Pantai Ambalat, mampu menggerakkan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Membantu mengurangi ketertinggalan pembangunan, meskipun 21% informan masih menyatakan belum sepenuhnya berhasil mengupayakan pengadaan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana dan berkesinambungan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan baru 69% informan yang mempersepsikan bahwa program TJSL perusahaan sudah mampu menyerap peluang berusaha bagi masyarakat, 63% informan berpendapat program sudah mengupayakan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meskipun hanya 28% informan yang setuju bahwa program telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pembinaan usaha perekonomian lokal. Kemudian terkait unsur persepsi masyarakat terhadap program TJSL perusahaan ini, 72% informan mengakui bahwa komunikasi program selama ini telah memperhatikan unsur kebenaran pesan yang disampaikan kepada masyarakat dan kedudukan masyarakat dianggap setara dalam kegiatan hanya diakui oleh 62% informan. Meskipun demikian 52% informan menyatakan jika perusahaan belum memperhatikan umpan balik pesan yang disampaikan dengan baik, serta 66% informan merasa perusahaan belum memperhatikan budaya yang berlaku di wilayah lokal dalam prosesnya.

4.2.5. Analisis IKM dan SRoI

Pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan skor *Social Return on Investment* (SRoI) dari ketiga lokus penelitian.

A. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan sebuah instrumen bagi pengelola program Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat dan juga untuk mengetahui kualitas kinerja pengelola tersebut, sekaligus sebagai alternatif kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan program TJSL. IKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan skor rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kinerja masing-masing atribut yang merupakan adopsi dari Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi 9 atribut yang relevan dan reliabel.

Analisis kepuasan masyarakat menggunakan IKM dibutuhkan untuk memahami seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat terhadap atribut-atribut yang terdapat pada suatu program. Keberhasilan pengelolaan program sangat tergantung pada kepuasan masyarakat dan akan tercapai jika kinerja (*performance*) pengelolaan program telah sesuai dengan harapan atau kepentingan (*importance*) masyarakat. Apabila masih terdapat ketidakpuasan masyarakat, pengelola program perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada masing-masing atribut yang terindikasi kurang sesuai dengan harapan atau kepentingan masyarakat sehingga kepercayaan dan peningkatan kepuasan masyarakat pada pengelolaan program dapat tercapai. Peningkatan kepentingan

terhadap pengelolaan program tidak dapat dilakukan oleh pengelola program karena tingkat kepentingan sangat bergantung kepada kebutuhan masing-masing masyarakat yang berbeda-beda sehingga pengelola program tidak dapat mempengaruhi tingkat kepentingan masyarakat terhadap sebuah pengelolaan program. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan kepuasan masyarakat melalui peningkatan kinerja pengelola program.

Tabel 12 Atribut dan Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

No	Atribut	Indikator
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kejelasan mengenai persyaratan pengajuan program CSR b. Kemudahan dalam mengurus/memenuhi persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbukaan informasi mengenai adanya program CSR b. Kejelasan alur pengajuan dan verifikasi program CSR c. Kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan d. Kesesuaian jenis program CSR yang dipilih dengan kebutuhan masyarakat
3	Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian jadwal pendampingan dengan pelaksanaan program CSR b. Kecepatan waktu pelayanan/pendampingan program CSR
4	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dikenakan penambahan biaya transaksional/pungutan liar kepada kelompok masyarakat penerima program CSR b. Biaya program CSR yang dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan formal/kontrak yang ditandatangani

No	Atribut	Indikator
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kemampuan manajemen usaha masyarakat b. Pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kualitas produk/jasa yang dihasilkan c. Pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kualitas lingkungan/ekologi
6	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi vokasional/ teknis terapan petugas/pendamping program CSR b. Kompetensi manajemen administrasi petugas/pendamping program CSR c. Kompetensi manajemen keuangan petugas/pendamping program CSR d. Perluasan Jejaring kerja (networking) dengan mitra program CSR
7	Perilaku Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Identitas petugas pendamping program CSR b. Latar belakang pendidikan formal petugas/pendamping program CSR c. Kesopanan dan keramahan petugas pendamping dalam proses pendampingan program CSR d. Keterbukaan informasi program CSR yang disebarluaskan kepada masyarakat e. Tanggung jawab pada supervisi dan pelaporan program CSR
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kejelasan prosedur penanganan keluhan dalam pelaksanaan program CSR b. Kejelasan waktu penanganan keluhan dalam pelaksanaan program CSR
9	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan alat produksi kerja

No	Atribut	Indikator
		b. Ketersediaan sistem komunikasi/koordinasi

Sumber: Permen PANRB No 14 Tahun 2017 yang diadaptasi

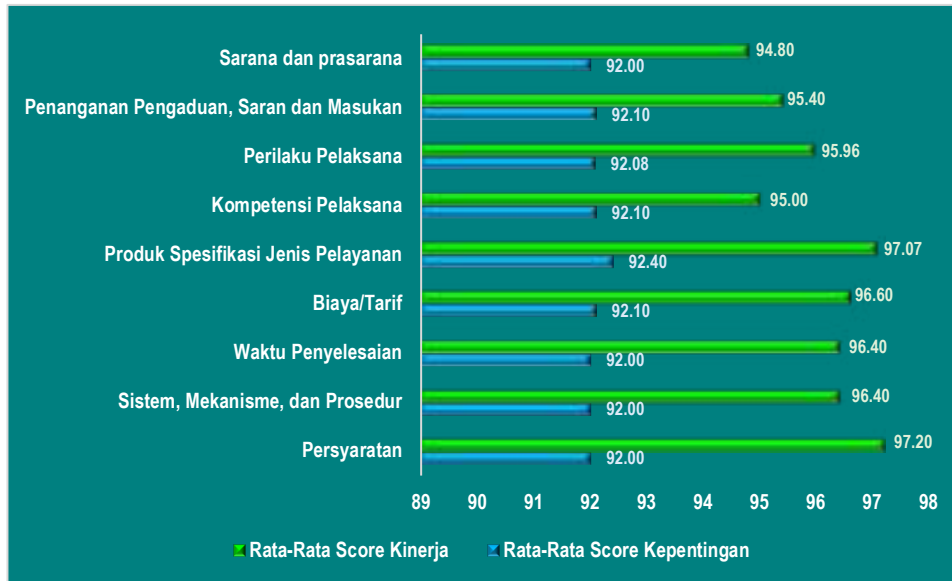
IKM dilakukan pada Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana nilai IKM berdasarkan skor rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kinerja terhadap 9 atribut berdasarkan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menunjukkan angka sebesar 96,06. Nilai ini berada pada kategori pada rentang nilai $80\% < \text{IKM} \leq 100\%$ yang menggambarkan bahwa nilai IKM berada pada kriteria "Sangat Baik". Nilai IKM ini juga menggambarkan bahwa masih terdapat sebesar 3,94 persen masyarakat penerima manfaat masih merasa belum puas terhadap kinerja layanan Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Nilai IKM pada Sembilan Atribut Terhadap Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Atribut	Rata-Rata Score Kepentingan	Weighted Factors	Rata-Rata Score Kinerja	Weighted Score
1	Persyaratan	4,60	11,10	4,86	53,95
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	4,60	11,10	4,82	53,51
3	Waktu Penyelesaian	4,60	11,10	4,82	53,51
4	Biaya/Tarif	4,61	11,11	4,83	53,67
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,62	11,15	4,85	54,11
6	Kompetensi Pelaksana	4,61	11,11	4,75	52,79
7	Perilaku Pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,60	11,11	4,80	53,31
8	Sarana dan prasarana	4,61	11,11	4,77	53,01
9		4,60	11,10	4,74	52,62
		41,44		43,24	480,46
Indeks Kepuasan Masyarakat					96,09

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Secara infografis, tingkat kepentingan menurut masyarakat penerima manfaat Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara pada masing-masing atribut secara keseluruhan atribut berada pada kategori “Sangat Penting”, dengan rentang tingkat kepentingan antara 95,00 sampai dengan 97,20. Selain itu, nilai tingkat kinerja pada masing-masing atribut terlihat secara umum atribut berada pada kategori “Baik”. dengan rentang tingkat kinerja antara 92,00 sampai dengan 92,40. Nilai tingkat kepentingan dan kinerja dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Nilai tingkat kepentingan dan kinerja pada sembilan atribut IKM pada Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

Sembilan atribut berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 kemudian dijabarkan kembali menjadi 26 indikator untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat secara lebih terperinci. Pada tabel dibawah terlihat nilai IKM sebesar 96,01 persen yang berada pada rentang nilai $80\% < IKM \leq 100\%$ atau masuk pada kriteria “Sangat Baik”. Nilai IKM sebesar 96,01 persen ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat sebesar 3,99 persen masyarakat yang belum merasa sangat puas terhadap kinerja Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari nilai rata-rata kepentingan menunjukkan bahwa hampir semua atribut dianggap penting oleh masyarakat penerima manfaat, dimana atribut kepentingan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi adalah pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kemampuan manajemen usaha masyarakat. Selain itu, nilai rata-rata kinerja yang menunjukkan kinerja paling tinggi adalah kejelasan mengenai persyaratan pengajuan program CSR; dan

pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kemampuan manajemen usaha masyarakat.

Tabel 14 Nilai IKM pada 26 indikator terhadap Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rata-Rata Score Kepentingan	Weighted Factors	Rata-Rata Score Kinerja	Weighted Score
1	4,60	3,84	4,88	18,75
2	4,60	3,84	4,84	18,60
3	4,60	3,84	4,86	18,67
4	4,60	3,84	4,84	18,60
5	4,60	3,84	4,76	18,29
6	4,60	3,84	4,82	18,52
7	4,60	3,84	4,82	18,52
8	4,60	3,84	4,76	18,29
9	4,61	3,85	4,82	18,56
10	4,60	3,84	4,84	18,60
11	4,64	3,88	4,88	18,91
12	4,60	3,84	4,82	18,52
13	4,62	3,86	4,86	18,75
14	4,60	3,84	4,74	18,21
15	4,62	3,86	4,78	18,45
16	4,60	3,84	4,74	18,21
17	4,60	3,84	4,74	18,21
18	4,60	3,84	4,87	18,71
19	4,60	3,84	4,76	18,29
20	4,60	3,84	4,84	18,60
21	4,62	3,86	4,78	18,45
22	4,60	3,84	4,74	18,21
23	4,60	3,84	4,78	18,37
24	4,61	3,85	4,76	18,33
25	4,60	3,84	4,74	18,21
26	4,60	3,84	4,74	18,21
	119,72		124,81	480,04
Indeks Kepuasan Masyarakat				96,01

Keterangan: 1) Kejelasan mengenai persyaratan pengajuan program CSR; 2) Kemudahan dalam mengurus/ memenuhi persyaratan; 3) Keterbukaan informasi mengenai adanya program CSR; 4) Kejelasan alur pengajuan dan verifikasi program CSR; 5) Kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan; 6) Kesesuaian jenis program CSR yang dipilih dengan kebutuhan masyarakat; 7) Kesesuaian jadwal pendampingan dengan pelaksanaan program CSR; 8) Kecepatan waktu pelayanan/pendampingan program CSR; 9) Tidak dikenakan penambahan biaya transaksional/pungutan liar kepada kelompok masyarakat penerima program CSR; 10) Biaya program CSR yang dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan formal/kontrak yang ditandatangani; 11) Pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kemampuan manajemen usaha masyarakat; 12) Pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kualitas produk/jasa yang dihasilkan; 13) Pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kualitas lingkungan/ekologi; 14) Kompetensi vokasional/ teknis terapan petugas/pendamping program CSR; 15) Kompetensi manajemen administrasi petugas/pendamping program CSR; 16) Kompetensi manajemen keuangan petugas/pendamping program CSR; 17) Perluasan Jejaring kerja (networking) dengan mitra program CSR; 18) Identitas petugas pendamping program CSR; 19) Latar belakang pendidikan formal petugas/pendamping program CSR; 20) Kesopanan dan keramahan petugas pendamping dalam proses pendampingan program CSR; 21) Keterbukaan informasi program CSR

yang disebarluaskan kepada masyarakat; 22) Tanggung jawab pada supervisi dan pelaporan program CSR; 23) Kejelasan prosedur penanganan keluhan dalam pelaksanaan program CSR; 24) Kejelasan waktu penanganan keluhan dalam pelaksanaan program CSR; 25) Ketersediaan alat produksi kerja; 26) Ketersediaan sistem komunikasi/koordinasi.

Nilai IKM yang belum menunjukkan angka 100 persen mengindikasikan bahwa pengelola Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan upaya untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, dengan cara melakukan perbaikan atribut-atribut dalam sebuah program TJSL yang dianggap belum memuaskan bagi masyarakat. Pembagian kelompok berdasarkan prioritas perbaikan perlu dilakukan untuk mengetahui atribut mana yang perlu ditingkatkan. *Importance Performance Analysis* (IPA) merupakan metode yang dapat menentukan prioritas atribut kinerja pada sebuah program yang perlu dilakukan peningkatan melalui sebuah diagram kartesius yang terbagi ke dalam empat kuadran. Nilai atribut diperoleh melalui nilai rata-rata tingkat kepentingan dan nilai rata-rata tingkat kinerja pada masing-masing atribut yang terdapat pada sebuah program. Tingkat kepentingan menggambarkan harapan masyarakat terhadap kepentingan atau kualitas sebuah program TJSL, sedangkan tingkat kinerja menunjukkan penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh sebuah program TJSL apakah sesuai dengan harapan mereka atau tidak.

Dari tabel di atas diperoleh nilai total tingkat kepentingan sebesar 119,72 atau rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,60 dan nilai total tingkat kinerja sebesar 124,81 atau rata-rata tingkat kinerja sebesar 4,80. Kedua nilai rata-rata tersebut akan menjadi garis tengah pada diagram kartesius *Importance Performance Analysis* (IPA). Sumbu Y merupakan tingkat kepentingan dan sumbu X adalah tingkat kinerja sehingga membentuk empat kuadran. Keempat kuadran tersebut memberikan interpretasi terhadap atribut apa saja yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang menjadi prioritas utama, pertahankan prestasi, berlebihan, dan prioritas rendah. Diagram kartesius IPA Program TJSL Pembangunan

Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 6 Importance Performance Analysis (IPA) pada Program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

Penjelasan atas diagram di atas sebagai berikut:

- Kuadran I (Proritas Utama)

Atribut yang terdapat Kuadran I merupakan atribut yang menjadi proritas utama dalam upaya peningkatan kinerja sehingga dapat memenuhi kepuasan masyarakat penerima manfaat. Atribut yang terdapat pada atribut ini masih dirasakan kurang memuaskan atau belum sesuai harapan masyarakat. Atribut yang terdapat di Kuadran I adalah: 5) Kesetaraan dalam proses pengambilan

keputusan; 8) Kecepatan waktu pelayanan/pendampingan program CSR; 14) Kompetensi vokasional/ teknis terapan petugas/pendamping program CSR; 15) Kompetensi manajemen administrasi petugas/pendamping program CSR; 16) Kompetensi manajemen keuangan petugas/pendamping program CSR; 17) Perluasan Jejaring kerja (networking) dengan mitra program CSR; 19) Latar belakang pendidikan formal petugas/pendamping program CSR; 21) Keterbukaan informasi program CSR yang disebarluaskan kepada masyarakat; 22) Tanggung jawab pada supervisi dan pelaporan program CSR; 23) Kejelasan prosedur penanganan keluhan dalam pelaksanaan program CSR; 24) Kejelasan waktu penanganan keluhan dalam pelaksanaan program CSR; 25) Ketersediaan alat produksi kerja; 26) Ketersediaan sistem komunikasi/koordinasi.

- Kuadran II (Pertahankan Prestasi)

Atribut yang terdapat Kuadran II merupakan atribut yang memiliki tingkat kepentingan yang sangat penting dan juga kinerja baik yang dirasakan masyarakat penerima manfaat telah sesuai atau melebihi harapan. Atribut yang terdapat di kuadran ini perlu dipertahankan kinerjanya agar kepuasan masyarakat tetap meningkat. Atribut yang terdapat di Kuadran II adalah: 1) Kejelasan mengenai persyaratan pengajuan program CSR; 2) Kemudahan dalam mengurus/ memenuhi persyaratan; 3) Keterbukaan informasi mengenai adanya program CSR; 4) Kejelasan alur pengajuan dan verifikasi program CSR; 6) Kesesuaian jenis program CSR yang dipilih dengan kebutuhan masyarakat; 7) Kesesuaian jadwal pendampingan dengan pelaksanaan program CSR; 9) Tidak dikenakan penambahan biaya transaksional/pungutan liar kepada kelompok masyarakat penerima program CSR; 10) Biaya program CSR yang dikeluarkan

sesuai dengan kesepakatan formal/kontrak yang ditandatangani; 11) Pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kemampuan manajemen usaha masyarakat; 12) Pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kualitas produk/jasa yang dihasilkan; 13) Pendampingan usaha melalui program CSR untuk peningkatan kualitas lingkungan/ekologi; 18) Identitas petugas pendamping program CSR; 20) Kesopanan dan keramahan petugas pendamping dalam proses pendampingan program CSR.

- Kuadran III (Berlebihan)

Atribut yang terdapat Kuadran III merupakan atribut yang dirasakan berlebihan oleh masyarakat penerima manfaat. Atribut pada kuadran ini memiliki nilai rata-rata tingkat kepentingan yang rendah, namun nilai kinerja yang diperoleh sangat tinggi melebihi nilai rata-rata tingkat kinerja secara keseluruhan. Pada kuadran ini, atribut dapat dikurangi kinerjanya atau dialokasikan ke atribut lain yang dirasakan dibutuhkan oleh masyarakat penerima manfaat, terutama atribut yang berada di Kuadran I (proritas utama). Tidak terdapat atribut yang ada Kuadran III.

- Kuadran IV (Proritas rendah)

Atribut yang terdapat Kuadran IV merupakan kuadran yang memuat atribut kurang penting oleh masyarakat penerima manfaat dan tingkat kinerjanya dinilai kurang baik atau dirasa tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Atribut dalam kuadran ini menjadi proritas rendah untuk diperbaiki dan dianggap perbaikan atas atribut ini tidak menjadi proritas oleh pengelola program setelah proritas utama diselesaikan. Tidak terdapat atribut yang ada Kuadran IV.

B. Perhitungan *Social Return on Investment (SRoI)* Program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra

a) Identifikasi *Key Stakeholder*

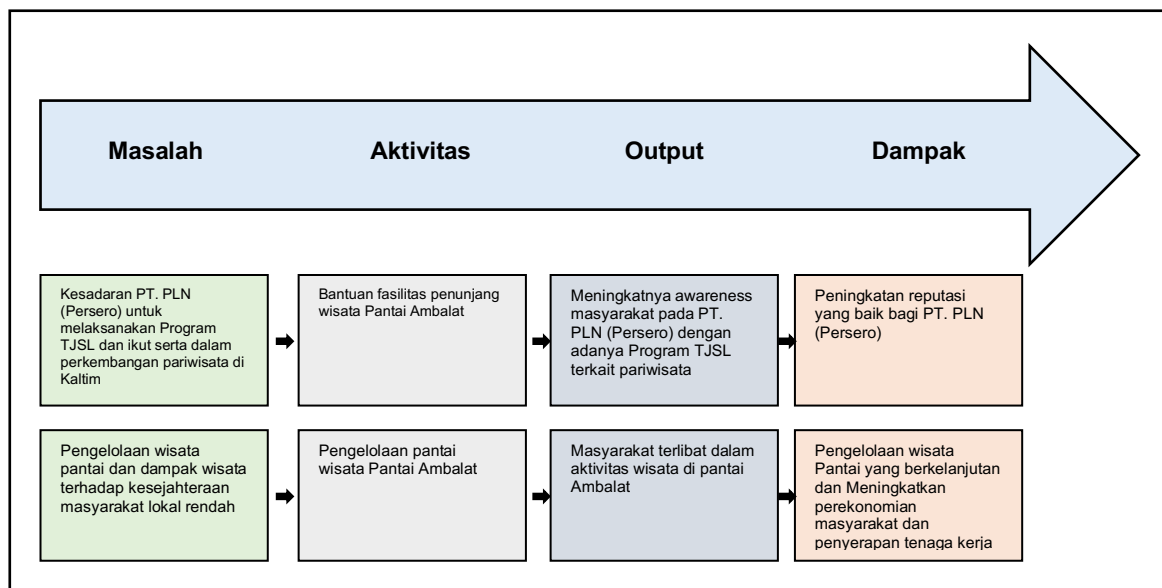
Key stakeholder yang dianalisis adalah orang-orang atau kelompok yang merasakan perubahan langsung secara materiil sebagai dampak dari pelaksanaan Program TJSL PT PLN (Persero). Dalam studi ini, *key stakeholder* yang diidentifikasi adalah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Karya Ambalat sebagai kelompok masyarakat penerima manfaat dari Program TJSL PT PLN (Persero) yaitu Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat.

Tabel 15 Identifikasi *Stakeholder* Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat

No	<i>Key Stakeholder</i>	Keterangan
1	Kantor Kelurahan	Perwakilan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Ambalat
2	Operator Wisata Pantai Ambalat (Pokdarwis Karya Ambalat)	<i>Stakeholder</i> utama: kelompok Sadar Wisata sebagai pengelola wisata Pantai Ambalat yang memperoleh manfaat langsung (<i>direct impact</i>) dari fasilitas yang berasal dari program TJSL PT PLN (Persero)
3	Pelaku Usaha	Kelompok masyarakat lokal yang memperoleh manfaat tidak langsung (<i>indirect impact</i>) dari kegiatan wisata Pantai Ambalat
4	Masyarakat Lokal	Masyarakat lokal yang memperoleh manfaat lanjutan (<i>induced impact</i>) dari keberadaan Program TJSL PT PLN (Persero)
5	PT PLN (Persero)	Pihak manajemen berperan sebagai pemberi tunggal bantuan dana pelaksanaan Program TJSL PT PLN (Persero)

b) Pemetaan Dampak

Pemetaan dampak yang dimulai dari proses hingga perhitungan rasio. pada tahap ini melibatkan para *stakeholder* untuk memastikan apakah sebuah program memiliki dampak yang relevan. Dalam memetakan dampak dilibatkan beberapa informan kunci yaitu melakukan wawancara atau menggali informasi dengan pihak Manajemen PT PLN (persero), Pengurus Pokdarwis Karya Ambalat, Ketua RT dan tokoh masyarakat di lokasi studi. Berdasarkan informasi yang didapat dari informan kunci maka dapat dibuat teori perubahan yang dialami oleh para *key stakeholder* pada pemetaan dampak.



Gambar 7 Teori Perubahan dalam Pemetaan Dampak Program TJSL PT PLN (Persero)

c) Penilaian Input

Input merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai modal berjalannya program. *Input* yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) dalam Program TJSL-nya akan dilakukan penilaian. Penilaian *input* dilakukan melalui proses pengkonversian *input* tersebut ke bentuk

moneter (nilai uang). Penilaian *input* yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara *key stakeholder*. Dalam Program TJSL PT PLN (Persero), *input* yang diberikan oleh pihak manajemen PT PLN (Persero) adalah Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat dengan dana keseluruhan yang dikeluarkan sebesar Rp 225.000.000,00.

Tabel 16 Penilaian *Input* Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat

No	Input	Nilai (Rp)
1	Flying Fox 60 meter	45.494.000
2	Skybike Panjang +/-40 meter	32.573.750
3	Rehab Bangunan Ambalat Center dan Pengadaan Barang UMKM Karya Ambalat	32.573.750
4	Transportasi, akomodasi, ongkir matrial/barang Flyingfox, Skybike	44.529.000
5	Transportasi, akomodasi, ongkir matrial/barang Flyingfox, Skybike	21.275.000
6	Tiang Menara Flyingfox, Skybike	66.150.000
7	By. Seremoni Pembuatan Video dan Pemuatan Berita di Sosmed	15.000.000
	Jumlah total	257.595.500
	Persetujuan Akhir	225.000.000

d) Klarifikasi *Output*

Output menunjukkan sebuah dampak yang dapat terlihat atau dirasakan dari adanya sebuah program. *Output* merupakan ringkasan aktivitas yang dilakukan oleh pemberi dan penerima program. beberapa *output* yang diperoleh dari aktivitas *stakeholder*, yaitu: 1)

Promosi kelurahan sebagai destinasi wisata pantai; 2) Mengelola wilayah destinasi wisata Pantai Ambalat; 3) Penjualan makanan dan minuman; dan 4) Aktivitas ekonomi lokal untuk kebutuhan dasar.

Tabel 17 Klarifikasi *Output* Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat

No	Stakeholder	Aktivitas	Output
1	Kantor Kelurahan	Promosi kelurahan sebagai destinasi wisata pantai	Kelurahan sebagai salah satu destinasi wisata pantai di Kabupaten Kutai Kartanegara
2	Operator Wisata Pantai Ambalat (Pokdarwis Karya Ambalat)	Mengelola wilayah destinasi wisata Pantai Ambalat	Berjalannya program kerja Pokdarwis Karya Ambalat
3	Pelaku Usaha	Penjualan makanan dan minuman	Keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas wisata
4	Masyarakat Lokal	Aktivitas ekonomi lokal untuk kebutuhan dasar	Tumbuhnya perekonomian lokal di kawasan wisata

e) Penetapan *Outcome* / Dampak

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program TJSL oleh PT PLN (Persero) dianalisis melalui hasil wawancara dengan *key stakeholder* tentang perubahan dan manfaat yang dirasakan dari berjalannya program. Beberapa *outcome* / dampak yang diidentifikasi, yaitu: 1) Peningkatan kualitas layanan wisata dan usaha ekonomi kreatif; 2) Peningkatan arus kas masuk yang berasal kunjungan wisatawan dan jasa; 3) Peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja; 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan 5) Meningkatnya *awareness* masyarakat pada PT PLN

(Persero) dengan adanya Program TJSL terkait pengembangan pariwisata.

Tabel 18 Penetapan *Outcome* / Dampak Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat

No	Stakeholder	Output	Outcome / Dampak
1	Kantor Kelurahan	Kelurahan sebagai salah satu destinasi wisata pantai di Kabupaten Kutai Kartanegara	Peningkatan kualitas layanan wisata dan usaha ekonomi kreatif
2	Operator Wisata Pantai Ambalat (Pokdarwis Karya Ambalat)	Berjalannya program kerja Pokdarwis Karya Ambalat	Peningkatan arus kas masuk yang berasal kunjungan wisatawan dan jasa
3	Pelaku Usaha	Keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas wisata	Peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja
4	Masyarakat Lokal	Tumbuhnya perekonomian lokal di kawasan wisata	Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal
5	PT PLN (Persero)	BUMN yang menyalurkan Program TJSL PT PLN	Meningkatnya awareness masyarakat pada PT PLN (Persero) dengan adanya Program TJSL terkait pengembangan pariwisata

f) Penetapan Nilai Dampak

Penilaian terhadap dampak dilakukan dengan memberikan nilai moneter (uang) terhadap setiap dampak yang terjadi. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan *financial proxy* atau peramalan keuangan yang merupakan salah satu kelebihan analisis SROI. Penentuan *financial proxy* pada studi ini dilakukan dengan informasi

yang diperoleh dari *key stakeholder* dan asumsi-asumsi yang terkait dengan penilaian yang dilakukan dalam melakukan *financial proxy*.

Tabel 19 Penetapan *Financial Proxy* pada Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat

No	Dampak	<i>Financial Proxy</i>
1	Peningkatan kualitas layanan wisata dan usaha ekonomi kreatif	Biaya pembangunan fasilitas wisata
2	Peningkatan arus kas masuk yang berasal kunjungan wisatawan dan jasa	Retribusi (<i>entry fee</i>) dan sewa fasilitas wisata
3	Peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja	Hasil penjualan makanan dan minuman
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal	Biaya konsumsi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh operator wisata dan pelaku usaha wisata
5	Meningkatnya awareness masyarakat pada PT PLN (Persero) dengan adanya Program TJSL terkait pengembangan pariwisata	Nilai ekonomi Wisata Pantai Ambalat

Penjelasan *financial proxy* untuk setiap dampak sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas layanan wisata dan usaha ekonomi kreatif

Dampak dari peningkatan kualitas layanan wisata dan usaha ekonomi kreatif diestimasi dari biaya pembangunan fasilitas penunjang Pantai Ambalat. Nilai dampak diasumsikan dari bantuan dari manajemen PLN yaitu sebesar Rp 225.000.000,00.

2) Peningkatan arus kas masuk yang berasal kunjungan wisatawan dan jasa

Dampak dari peningkatan arus kas masuk yang berasal dari retribusi tiket masuk yang diestimasi dari jumlah kendaraan yang masuk meliputi kendaraan sepeda motor, mobil, minibus, dan bus. Berdasarkan hasil wawancara diketahui jumlah pengunjung ke Pantai Ambalat rata-rata per tahunnya sebanyak 31.727 pengunjung berdasarkan data BPS (2022). Jumlah kendaraan dari pengunjung per tahun tersebut diestimasi sebanyak 5.195 unit per tahun. Jumlah unit kendaraan diestimasi dalam setahun untuk masing-masing kendaraan adalah mobil sebanyak 2.380 unit; sepeda motor sebanyak 2.380; minibus sebanyak 238 unit; dan bus sebanyak 198 unit. Hasil wawancara juga diketahui biaya masuk kendaraan meliputi sepeda motor sebesar Rp 15.000,00; mobil sebesar Rp 25.000,00; minibus sebesar Rp 50.000,00; dan bus sebesar Rp 100.000,00. Dari proyeksi tersebut, maka biaya retribusi atau tiket masuk dapat diestimasi sebesar Rp 126.908.000,00 per tahunnya. Selanjutnya, biaya sewa gazebo untuk 12 unit diproyeksi sebesar Rp 7.200.000,00 per tahun; dan biaya sewa warung makanan dan minuman untuk 10 unit sebesar Rp 60.000.000,00 per tahun. Total dari dampak dari peningkatan arus kas masuk diestimasi sebesar Rp 194.108.000,00.

3) Peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja

Untuk menilai dampak dari peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja diestimasi menggunakan metode pendekatan preferensi yang dikemukakan. Data yang diperoleh diasumsikan dari jumlah pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman di kawasan wisata pantai Ambalat. Berdasarkan hasil wawancara *key stakeholder* diperoleh informasi rata-rata

pendapatan yang diperoleh pelaku usaha wisata sebesar Rp 3.000.000,00 per bulan atau Rp 36.000.000,00 per tahun. Dari 10 unit usaha warung yang telah dibangun dari TJSL PLN maka dapat diestimasi dampak dari peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja sebesar Rp 360.000.000,00 per tahun.

4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal

Dampak dari peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal diestimasi dari biaya konsumsi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh operator wisata dan pelaku usaha yang berada di kawasan Pantai Ambalat. Diasumsikan pengeluaran yang dilakukan masing-masing dari 30 operator wisata dan pelaku usaha rata-rata sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan, maka estimasi nilai perputaran ekonomi yang ada di kawasan tersebut sebagai akibat dari dampak pengeluaran dari 30 operator wisata dan pelaku usaha sebesar Rp 540.000.000,00 per tahun.

5) Meningkatnya *awareness* masyarakat pada PT PLN (Persero) dengan adanya Program TJSL terkait pengembangan pariwisata

Dampak dari meningkatnya *awareness* masyarakat pada PT PLN (Persero) dengan adanya Program TJSL terkait pengembangan pariwisata diestimasi dari Nilai ekonomi Wisata Pantai Ambalat. Nilai ekonomi kawasan wisata Pantai Ambalat diestimasi dari beberapa asumsi seperti: jumlah pengunjung berdasarkan data BPS (2022) sebanyak 31.727 pengunjung per tahun, rata-rata biaya kunjungan per pengunjung sebesar Rp 100.000 per kunjungan; dan biaya yang dibelanjakan oleh pengunjung di dalam kawasan wisata Pantai Ambalat hanya sebesar 30% dari biaya keseluruhan per pengunjung. Dari perhitungan tersebut diperoleh, nilai ekonomi dari kawasan Pantai Ambalat yang di *proxy* sebagai nilai dampak dari peningkatan *awareness* masyarakat pada Program

TJSL PT PLN (Persero) terkait pengembangan pariwisata sebesar Rp 951.810.000,00 per tahun.

Selain itu, dalam penetapan nilai dampak juga diperhitungkan nilai *Deadweight* dan *Attribution*. *Deadweight* merupakan ukuran dari jumlah dampak yang akan terjadi bahkan jika kegiatan tersebut tidak terjadi. *Deadweight* akan diukur sebagai presentase dan kemudian presentase hasilnya dikurangi dari jumlah total hasilnya. *Deadweight* untuk dampak dalam studi ini adalah: 1) Peningkatan kualitas layanan wisata dan usaha ekonomi kreatif (25%); 2) Peningkatan arus kas masuk yang berasal kunjungan wisatawan dan jasa (25%); 3) Peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja (50%); 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (50%); dan 5) Meningkatnya awareness masyarakat pada PT PLN (Persero) dengan adanya Program TJSL terkait pengembangan pariwisata (25%).

Attribution merupakan penilaian dari berapa banyak dampak tersebut disebabkan oleh kontribusi dari program lain atau pihak lain. *Attribution* dihitung sebagai presentase (proporsi hasil yang disebabkan program tersebut). *Attribution* untuk dampak dalam studi ini meliputi: 1) Peningkatan kualitas layanan wisata dan usaha ekonomi kreatif (25%); 2) Peningkatan arus kas masuk yang berasal kunjungan wisatawan dan jasa (50%); 3) Peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja (50%); 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (50%); dan 5) Meningkatnya awareness masyarakat pada PT. PLN (Persero) dengan adanya Program TJSL terkait pengembangan pariwisata (50%).

Tabel 20 Penetapan nilai dampak Program TJSL PT PLN (Persero)
Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat

No	Dampak	Deadweight (%)	Attribution (%)	Financial proxy (Rp)	Nilai Dampak	Persentase
1	Peningkatan kualitas layanan wisata dan usaha ekonomi kreatif	25	25	225.000.000	126.562.500	16,20
2	Peningkatan arus kas masuk yang berasal kunjungan wisatawan dan jasa	25	50	194.108.000	72.790.500	9,32
3	Peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja	50	50	360.000.000	90.000.000	11,52
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal	50	50	540.000.000	135.000.000	17,28
5	Meningkatnya awareness masyarakat pada PT. PLN (Persero) dengan adanya Program TJSL terkait pengembangan pariwisata	25	50	951.810.000	356.928.750	45,69
	Jumlah			2.270.918.000	781.281.750	100,00

g) SROI Ratio

SROI menghasilkan rasio yang dihitung berdasarkan persamaan:

$$SROI = \frac{\text{Net Present Value of Benefits}}{\text{Value of Inputs}}$$

Net present value of benefits merupakan total *outcome* / dampak yang dihasilkan oleh adanya Program TJSL PT PLN (Persero), sedangkan *value of inputs* merujuk pada keseluruhan input yang digunakan untuk menjalankan Program TJSL PT PLN (Persero). *Net present value* (NPV) dihitung berdasarkan suku bunga dasar kredit (*prime lending rate*) dari Bankaltimtura yang berlaku di wilayah studi yaitu 8 persen.

Hasil akhir dari perhitungan rasio SROI pada Program TJSL PT PLN (Persero) adalah 3,47 yang memberi interpretasi bahwa untuk setiap 1 (satu) rupiah yang diinvestasikan oleh PT PLN (Persero), akan menghasilkan nilai sosial atau timbal balik sosial atas investasi berupa manfaat yang dirasakan oleh para *stakeholder* sebesar 3,47 rupiah. Hasil ini menggambarkan bahwa Program TJSL PT PLN (Persero) ini telah berhasil dengan baik dalam memberikan manfaat yang berdampak bagi para *stakeholder*, yang ditunjukkan dengan nilai rasio yang lebih besar dari satu. Manfaat dalam analisis ini akan berlangsung selama satu tahun. Input investasi manajemen PLN terhadap program pelaksanaan TJSL sebesar Rp 225.000.000,00 telah menghasilkan nilai capaian finansial sebesar Rp 781.281.750,00 per tahunnya.

Tabel 21 Perhitungan Rasio SROI Program TJSL PT PLN (Persero) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat

No	Uraian	Nilai (Rp/tahun)
1	<i>Input</i>	
	Program TJSL Pantai Ambalat	225.000.000
2	Nilai Dampak	
	Peningkatan kualitas layanan wisata dan usaha ekonomi kreatif	126.562.500
	Peningkatan arus kas masuk yang berasal kunjungan wisatawan dan jasa	72.790.500
	Peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja	90.000.000
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal	135.000.000
	Meningkatnya awareness masyarakat pada PT PLN (Persero) dengan adanya Program TJSL terkait pengembangan pariwisata	356.928.750
	Jumlah	781.281.750
	<i>Discount Factor (8%)</i>	0,93
	<i>NPV of Investment</i>	208.333.333
	<i>NPV of Benefit</i>	723.409.028
	<i>SROI Ratio</i>	3,47

BAB 5
KESIMPULAN & REKOMENDASI

5.1. Analisis Aktor

5.1.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis aktor di Program Pengembangan Pantai Ambalat Tahap III adalah:

1. Aktor yang memiliki pengaruh kuat sekaligus terdampak kuat dari program TJSL adalah Bumdes (kuadran 1).
2. Aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar namun kurang terdampak (kuadran 2) antara lain kepala kampung, tokoh perempuan dan patron/juragan/pemilik modal.
3. Aktor lain seperti kelompok pengguna SDA, tokoh agama dan Ketua RT/RW berada pada kuadran 4 yang berarti memiliki pengaruh maupun dampak rendah.

5.1.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program TJSL berdasar analisis aktor adalah:

1. Meningkatkan pelibatan aktor-aktor lain yang lebih banyak dalam program untuk menjaga keberhasilan dan keberlangsungan program TJSL. Aktor-aktor yang potensial untuk dilibatkan terutama aktor yang terdampak dari program, terutama aktor perempuan, dan pengguna SDA. Selain itu, aktor yang tidak terdampak tetapi memiliki kepedulian dan ketertarikan pada program dapat dilibatkan dalam program. Misalnya Ketua RT/RW yang dipandang memiliki kekuasaan untuk mendukung keberlangsungan program.
2. Diperlukan pelatihan pengembangan kapasitas bagi semua aktor agar semua aktor memiliki pengetahuan dan ketrampilan memadai dalam

mempengaruhi proses pengambilan keputusan program, pelaksanaan, evaluasi program, dan distribusi manfaat. Hal ini perlu dilakukan mengingat aktor yang berpengaruh pada program di lokasi penelitian hanya terpusat pada beberapa aktor saja. Ketergantungan program pada aktor tertentu berpotensi menghambat keberlanjutan program, karena kemungkinan terjadi krisis aktor yang menjalankan program.

3. Pengembangan kelembagaan dan jaringan program lintas RT diperlukan agar program-program yang dijalankan bisa berdampak lebih besar dan luas. Terobosan bisa dilakukan oleh aktor dari pemerintah desa maupun oleh aktor lain yang memiliki jaringan sosial dan pengaruh luas, setidaknya di tingkat kampung (pemerintah desa). Misalnya patron, tokoh agama, atau tokoh adat dapat dimintai bantuan untuk mengembangkan program melalui jaringan sosial yang dimiliki.

5.2. Analisis Dinamika Kelompok

5.2.1 Kesimpulan

Perhitungan tingkat dinamika kelompok masyarakat yang terdapat di Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kategori tinggi, khususnya kelompok-kelompok masyarakat Sinar Bahari, Handil Sejahtera, Kelompok Wanita, Sumekar Mancur, dan Pokdarwis Karya.

5.2.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diusulkan untuk pengembangan kapasitas kelompok disusun berdasarkan indikator adalah setiap kelompok harus tetap mempertahankan sikap atas seluruh indikator dinamika kelompok selain indikator maksud tersembunyi, karena anggota kelompok telah memiliki persepsi yang sangat baik dalam pengembangan kelompok. Pada indikator maksud tersembunyi, anggota kelompok harus mampu

menurunkan sikap untuk mementingkan tujuan pribadi, karena pengembangan kelompok merupakan prioritas utama bagi anggota kelompok.

5.3. Analisis Finansial

5.3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis usaha yang telah dilakukan pada usaha ekonomi yang berada di wilayah Program TJSL Pengembangan Pantai Ambalat antara lain penangkapan ikan dengan alat tangkap rengge, pertanian sayuran, makanan olahan, dan pembesaran sapi. Seluruh usaha yang dijalankan oleh masyarakat telah memenuhi kriteria investasi dan layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena telah menunjukkan kinerja investasi dan memberikan keuntungan potensial secara ekonomi dan sosial.

5.3.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja usaha yang dikelola masyarakat adalah dibutuhkannya program sosialisasi pentingnya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya tersebut dengan tidak menggunakan alat-alat tangkap yang bersifat destruktif. Tujuannya agar dapat mewujudkan pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi tepat guna untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap yang mencakup teknologi pengumpulan ikan (*fish aggregating devices*) yang ramah lingkungan (seperti rumpon, terumbu karang buatan), teknologi penentuan posisi (global positioning system) dan teknologi deteksi populasi ikan (*fish finder*).

5.4. Analisis *Community Relations*

5.4.1. Kesimpulan

Hasil penelitian terkait hubungan komunitas yang telah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) UIW Kaltimra yang dilaksanakan di Pantai Ambalat Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Kutai Kartanegara menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan dari faktor komunikasi ditemukan bahwa baru sebagian informan memahami bahwa PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan pelayan publik yang bertugas untuk mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Namun demikian hanya 2 dari 29 orang informan yang menyatakan memiliki saudara yang bekerja di PT PLN (Persero), pun demikian ikatan persaudaraan tersebut tidak begitu memberikan pengaruh apapun terhadap bantuan pelayanan yang dibutuhkan ketika harus berurusan dengan perusahaan.
2. Para informan di lokasi penelitian ini secara beragam menyatakan pernah menerima informasi terkait Program TJSL PT PLN (Persero) dalam rentang waktu sejak tahun 2018-2022. Namun hanya Bapak Lurah yang menyatakan pernah mendapatkan informasi langsung dari pegawai PT PLN (Persero), bahkan para tokoh agama setempat menyatakan hampir tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait program. Mayoritas informan beranggapan bahwa perusahaan sengaja menyampaikan informasi hanya kepada perwakilan masyarakat saja, dengan frekuensi yang terbilang jarang hanya 1-3 kali dalam setahun.
3. Sebagian informan sebagai perwakilan masyarakat menyatakan masih tidak pas dengan upaya perusahaan karena baru berupa fasilitas umum, dan belum benar-benar menyentuh ke aktivitas pemberdayaan masyarakat, serta baru dalam lingkup Pantai Ambalat saja. Sementara

ada potensi lain yang bisa ditingkatkan dan diberdayakan seperti pariwisata hutan mangrove agar bantuan lebih terasa merata.

4. Secara keseluruhan faktor ekspektasi masyarakat menunjukkan bahwa program TJSL perusahaan sudah memenuhi harapan masyarakat, meskipun memang baru terfokus di Pantai Ambalat saja. Namun mayoritas informan masih berharap PT PLN (Persero) kedepannya bisa mengalokasikan program TJSL baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam; seperti pelatihan bagi nelayan lokal, mengembangkan wisata hutan mangrove, dan pengembangan hutan bekantan.
5. Terkait persepsi masyarakat tentang program TJSL PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mempersepsikan program ini bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur, menggerakkan perekonomian masyarakat, dan mengurangi ketertinggalan pembangunan wilayah mereka. Hal yang sama terkait optimisme mereka bahwa kedepannya program TJSL perusahaan akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan pembinaan usaha perekonomian masyarakat lokal. Namun demikian komunikasi publik perusahaan harus semakin ditingkatkan kedepannya terutama dengan lebih memperhatikan umpan balik pesan yang disampaikan oleh masyarakat.

5.4.2. Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan strategi hubungan komunitas PT PLN (Persero) UIW Kaltimra kedepannya adalah:

1. Merencanakan komunikasi publik dan program TJSL yang lebih baik lagi dengan berdasarkan pada hasil pemetaan sosial (*social mapping*) yang didapatkan dari penelitian sebagai data sosial masyarakat.

2. Melakukan *engagement* kepada masyarakat dengan masuk lebih luas dan beragam lagi dalam kelompok masyarakat dengan secara intensif melibatkan perwakilan masyarakat terutama para RT, tokoh-tokoh perempuan, tokoh agama, aparat pemerintahan, pengusaha lokal, tokoh pendidikan, dan juga pemuka adat setempat.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat potensial melalui program TJSL terpilih untuk meningkatkan kualitas kemampuan spesifik, berpikir, dan keterampilan masyarakat sesuai potensi sumber daya lokal yang dimiliki.
4. Melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi program TJSL perusahaan. Dalam upaya perencanaan program, selain dengan melakukan pemetaan potensi sumber daya lokal, PT PLN (Persero) UIW Kaltimra dapat melakukan *focus group discussion* dengan pemangku kepentingan terkait untuk menyusun perencanaan program dan *action plan*, mulai dari tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya (*program roadmap*) beserta aktor dan kelompok-kelompok sumberdaya target di wilayah terpilih. Begitu juga dalam mengimplementasikan rangkaian program yang disusun dalam roadmap tersebut harus melibatkan sejumlah elemen masyarakat secara penuh.
5. Memberikan pendampingan secara rutin dan intensif dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat terpilih, serta membantu menangani pengelolaan isu yang mungkin muncul dalam kelompok ekonomi masyarakat sasaran target sampai kelompok tersebut bisa berdaya secara mandiri.
6. Memberikan program dukungan kepada masyarakat dan kelompok ekonomi terpilih sesuai dengan kebutuhan di lapangan agar program pemberdayaan yang ditargetkan bisa benar-benar mencapai objektif jangka panjang sebagaimana yang telah ditetapkan bersama-sama.

7. Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat dan atau anggota kelompok ekonomi masyarakat yang memiliki hasil karya luar biasa, dengan gagasan pokok yang mencerminkan jiwa kemandirian dan jiwa kepemimpinan serta memiliki komitmen tinggi bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar mereka.

5.5. Analisis SROI & IKM

5.5.1 Kesimpulan

Kesimpulan terkait kebijakan untuk meningkatkan kepuasan dan kepentingan program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat menunjukkan nilai sebesar 96,01 persen atau masuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Selain itu masih terdapat 3,99 persen masyarakat atau penerima manfaat program yang belum merasa puas terhadap kinerja program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat.

Pada program program TJSL Pembangunan Fasilitas Penunjang Pantai Ambalat menghasilkan nilai rasio SROI sebesar 3,47. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1 yang diinvestasikan oleh PT PLN (Persero) Kaltimra kepada program TJSL akan menciptakan nilai pengembalian sosial sebesar Rp 3,47 sebagai manfaat atas investasi sosial program tersebut. Manfaat dalam analisis ini akan berlangsung selama satu tahun. Input investasi manajemen PLN terhadap program pelaksanaan TJSL sebesar Rp 225.000.000,00 telah menghasilkan nilai capaian finansial sebesar Rp 781.281.750,00 per tahunnya. Rasio SROI ini mengalami peningkatan dari perhitungan tahun lalu sebesar 3,21, yang berarti intervensi-intervensi yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Kaltimra selama satu tahun kebelakang telah memberikan dampak positif pada peningkatan nilai SROI Program TJSL di Pantai Ambalat.

5.5.2 Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepuasan dan kepentingan program TJSL PT PLN (Persero) UIW Kaltimra kedepannya adalah:

1. Berdasarkan hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *Importance Performance Analysis* (IPA), maka pihak PT PLN (Persero) UIW Kaltimra hendaknya meningkatkan kualitas layanan dengan memperbaiki kinerja atribut-atribut yang memiliki tingkat kinerja yang masih rendah namun dianggap penting oleh masyarakat. Atribut-atribut yang menjadi perhatian adalah atribut yang masuk pada kuadran satu.
2. PT PLN (Persero) UIW Kaltimra hendaknya mensinergikan program TJSL berbasis kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat dengan membuat perencanaan jangka menengah program TJSL.
3. Dalam mewujudkan keberhasilan program TJSL, PT PLN (Persero) UIW Kaltimra hendaknya melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkesinambungan terhadap program TJSL.
4. Hendaknya PT PLN (Persero) UIW Kaltimra membangun prosedur operasional standar sebagai panduan bagi semua partisipan serta pemangku pemangku kepentingan dalam merencanakan, mengakses, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program TJSL.
5. PT PLN (Persero) UIW Kaltimra dapat menerapkan strategi difusi inovasi berjenjang yang mempertimbangkan kesesuaian latar pengetahuan dan pengalaman kelompok masyarakat yang menjadi mitra program TJSL dengan persepsinya terhadap karakteristik program TJSL sebagai suatu paket inovasi (karakter manfaat relatif, kesesuaian, kerumitan, peluang uji coba dan keteramatan).

6. PT PLN (Persero) UIW Kaltimra dapat melakukan program pendampingan secara tuntas dan menyeluruh pada proyek percontohan (*pilot project*) secara kolaboratif dengan kelompok masyarakat terpilih dan pendamping kegiatan (akademisi). Program pendampingan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian pada model dasar teknologi tepat guna yang akan didifusikan kepada masyarakat yang lebih luas. Secara paralel, program TJSJL juga memfasilitasi tokoh masyarakat yang menjadi model panutan (*role model*) untuk menguasai aspek teknis dan manajerial dari paket inovasi tersebut. Kombinasi strategi tersebut terkonfirmasi telah berhasil membangun basis dukungan dan partisipasi aktif anggota pada program TJSJL. Pada tahap selanjutnya, kondisi akan meningkatkan aspek keberlanjutan program dan potensi untuk replikasi/perluasan (*scaling up*).
7. PT PLN (Persero) UIW Kaltimra hendaknya memperkuat kualitas/kompetensi dan kuantitas/jumlah sumber daya manusia petugas pendamping program sebagai agen utama proses pemberdayaan masyarakat melalui program TJSJL.
8. PT PLN (Persero) UIW Kaltimra dapat membangun sistem layanan informasi dan publikasi program TJSJL yang sesuai dengan preferensi masyarakat sebagai media untuk mengakomodasi umpan balik dan konfirmasi dari kelompok mitra program TJSJL.
9. PT PLN (Persero) UIW Kaltimra dapat membangun jejaring kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga swadaya masyarakat dan agensi pembangunan lainnya untuk meningkatkan dayaguna dan daya jangkau program TJSJL.
10. Berkaitan dengan berakhirnya program bantuan pembangunan Desa Wisata pada tahun 2022, PT PLN (Persero) UIW Kaltimra dapat melakukan dukungan pengembangan dalam hal lain misalnya *soft skill* masyarakat yang sadar wisata, pengembangan UMKM setempat, dan

program lainnya sebagai bentuk pengembangan bantuan sosial bagi keberlanjutan program ini. Hal ini mengingat Program Desa Wisata Pantai Ambalat telah cukup eksis dan memperoleh perhatian yang baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga keterlibatan jangka panjang PT PLN (Persero) UIW Kaltimra dapat menjadi *intangible asset* yang menciptakan reputasi positif perusahaan. Hal tersebut bisa dicapai jika PT PLN (Persero) UIW Kaltimra tidak menghentikan dukungan secara signifikan melainkan melalui proses *disengagement* strategis secara bertahap. Dalam hal ini, PT PLN (Persero) UIW Kaltimra juga bisa bekerjasama dengan *stakeholder* lain seperti akademisi dan lembaga masyarakat dalam program-program dukungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M. W., & Craig, C. A. (2016). Rethinking corporate social responsibility in the age of climate change: A communication perspective. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.1186/s40991-016-0002-8>
- Aslaksen, H. M., Hildebrandt, C., & Johnsen, H. Chr. G. (2021). The long-term transformation of the concept of CSR: towards a more comprehensive emphasis on sustainability. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 6(1), 1-14. <https://doi.org/10.1186/s40991-021-00063-9>
- Blowfield, M. (2005). Corporate Social Responsibility: Reinventing the meaning of development? *International Affairs*, 81(3), 515-524. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2005.00466.x>
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2021). *Kecamatan Samboja dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. <https://kukarkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfveve=OWZkNzI0YmQ1NDkwNmM5NDMyMmY5ZjVh&xzmn=aHR0cHM6Ly9rdWthcmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMS8wOS8yNC85ZmQ3MjRiZDU0OTA2Yzk0MzIyZjlmNWVva2VjYW1hdGFuLXNhbWJvamEtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnearfeauf=MjAyMi0xMS0yMyAxODozNToxNw%3D%3D>
- Brundtland, G. H. (1987). *Report of The World Commission on Environment and Development*. The United Nation.
- Budiman, A., Prananingtyas, P., & Sukma, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas. *Notarius*, 13(1).
- Business for Social Responsibility. (2011). *Stakeholder Mapping (Five-Step Approach to Stakeholder Engagement)*. Business for Social Responsibility. http://www.bsr.org/reports/BSR_Stakeholder_Engagement_Series.pdf
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.
- Fordham, A. E., & Robinson, G. M. (2018). Mapping meanings of corporate social responsibility - an Australian case study. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 3(4). <https://doi.org/10.1186/s40991-018-0036-1>
- Gargani, J. (2017). The leap from ROI to SROI: Farther than expected? *Evaluation and Program Planning*, 64, 116-126. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.01.005>
- Husser, J., Andre, jean-marc, Barbat, G., & Lespinet-najib, V. (2012). CSR and sustainable development: Are the concepts compatible? *Management of*

- Environmental Quality An International Journal*, 23(6), 658–672.
<https://doi.org/10.1108/14777831211262936>
- Iriantara, Y. (2013). *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*. Simbiosis Rekatama Media.
- KPMG. (2018). *Social Return on Investment – Measuring Impact*.
<https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2019/01/Social-Return-on-Investment%E2%80%93Measuring-Impact.pdf>
- Lattimore, D., & Baskin. (2010). *Public Relations: Profesi dan Praktik Ed. 3*. Salemba Humanika.
- Lingane, A., & Olsen, S. (2004). Guidelines for Social Return on Investment. *California Management Review*, 46(3).
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2012). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. In *Universitas Indonesia_UI Press*.
- Nicholls, J. (2017). Social return on investment—Development and convergence. *Evaluation and Program Planning*, 64(1), 27–135.
<https://doi.org/doi:10.1016/j.evalprogplan.2016.11.011>
- Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzer, E., & Goodspeed, T. (2009). *A guide to social return on investment*. Cabinet Office.
- Ordóñez, C., & Duinker, P. N. (2010). Interpreting Sustainability for Urban Forests. *Jurnal Canada*, 2, 124–127.
- Pohan, A. P. (2018). Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2).
- Rusdin. (2016). Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure and the Implications of Earning Response Coefficient (ERC). *Jurnal AdBispreneur*, 1(6), 153–164.
- Salim, M. (2014). TAHAPAN COMMUNITY RELATIONS DALAM KEGIATAN CSR KONSERVASI LINGKUNGAN (Studi Kasus Terhadap Kegiatan CSR PT Djarum Pada Konservasi Lereng Gunung Muria). *Jurnal Komunikasi PROFETIK*, 7(1).
- Santoso, M. B., Raharjo, S. T., Apsari, N. C., & Whibawa, B. (2018, July 4). *Identifikasi Keterlibatan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)*. Padjadjaran Earth Dialogues: International Symposium on Geophysical Issues, Bandung.
- Sinaga, C. M., Intan, T., & Evilia, L. (2015). Strategi Community Relations PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom, Tbk) Dalam Usaha Peningkatan Pemanfaatan Internet Untuk Usaha Kecil Menengah Melalui Kegiatan Broadband Learning Centre. *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 4(2).
<https://doi.org/10.33508/jk.v4i2.771>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.

- Wibisono, S. (2022, October). *CSR PLN Peduli Kembangkan Wisata Pantai Ambalat di Kukar* [News]. https://kaltim.idntimes.com/business/economy/sri-wibisono/csr-pln-peduli-kembangkan-wisata-pantai-ambalat-di-kukar#google_vignette
- Yates, B. T., & Marra, M. (2017). Introduction: Social Return On Investment (SROI). *Eval Program Plann*, 64, 95-97. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.10.013>
- Yudarwati, G. A. (2013). Community Relations: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Organisasi. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 1(2). <https://doi.org/10.24002/jik.v1i2.164>
- Zulkifli. (2013). *Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia Pustaka.